

BULETIN LPJK



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

**Profesionalisme Jasa Konstruksi:
Pilar Masa Depan Pembangunan
Indonesia**

**Liputan Khusus:
Tantangan, Peluang, dan Strategi
Pengembangan Profesionalisme dalam
Industri Jasa Konstruksi Indonesia**

**Gambaran Pelaku Usaha Jasa
Konstruksi Menghadapi Dinamika
Jasa Konstruksi Masa Depan**

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA



DEWAN REDAKSI**Pembina/Pelindung**

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Pengarah

Taufik Widjoyono
Ludy Eqbal Almuhamadi
Agus Gendroyono
Agus Taufik Mulyono
Tri Widjajanto Joedosastro
Manlian Ronald Adventus Simanjuntak

Penanggung Jawab

Syarif Burhanuddin

Wakil Penanggung Jawab

Riky Aditya Nazir

Pimpinan Redaksi

Kusworo Darpito

Kontributor Bidang Badan Usaha

Annik Noer Nawarni
Rivaldo
Celine Oktavia Putri
Fioline Musdalifah

Kontributor Bidang Penilai Ahli dan Kegagalan Bangunan

Hendro Widodo
Gamaliel Eqno Dwiyanto
Nurfathonah Wulansari

Kontributor Bidang Pengembangan Keprofesian dan Usaha Berkelanjutan, TKKA dan Akreditasi Asosiasi

Nofa Fatkhur Rakhman
Rm. Dani Moeloek Arnansyah
Donny Judha Hasiholan Sibuea
Fadi Muhammad Akmal
Ines Nasywa Aulia
Sarah Muktafikah

Kontributor Bidang Manajemen Data

Dina Nurdiani
Andi Muhammad Iqrar

Kontributor IT

Devi Hilsa Farida
Betha Pandu Rizky Gumelar
Bryan Sudibyo
Fadly Faturrohman
Inna Normaningsih
Kurnia Amonito
Muhammad Arief Previasakti Suradi
Muhammad Yaseer Mawardi
Muhammad Zaim Hadi
Reynald Fitriyadi

TIM REDAKSI**Editor**

Denny Agiyantono
Wiworo Setyoningrum
Dyah Putri Ayu Fajarani Simbolon
Patriks Christian Sipa Pasambe

Desainer Grafis

Adelia Sekar Astuti
Muhammad Afnov Pratama

Fotografer/Dokumentator

Ahmad Syafiq
Karenina Ayu Sendyaning

Kontributor Humas

Rati Karimah
Lely Naraswari Duinesa Sitanggung

Kontributor Bidang Tenaga Kerja Konstruksi

Andi Ahmad Hardiman
Nur Indah Septianingsih

ALAMAT REDAKSI**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

Jalan Wijaya I Nomor 68,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
12170

Telepon:

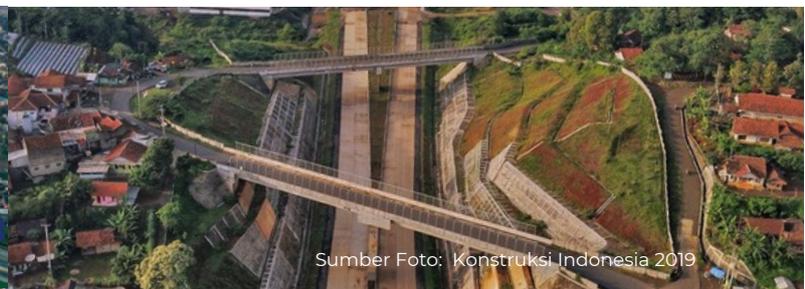
+62 21 2709 3738

E-mail:

sekretariatlpjk@pu.go.id

Website:

lpjk.pu.go.id



DAFTAR ISI

06

SALAM REDAKSI

Pimpinan Redaksi Buletin LPJK

07

OPINI UTAMA

Profesionalisme Jasa Konstruksi Pilar Masa Depan

11

DIGITALISASI & TRANSPARANSI

Transformasi Digital e-SIMPAN dalam Layanan Sertifikasi dan Pencatatan Pengalaman

17

DIGITALISASI & TRANSPARANSI

Proses Bisnis SIKI : Pondasi Menuju Pengadaan Yang Lebih Cerdas

22

SERTIFIKASI & KOMPETENSI

Dinamika Perkembangan SKK dan SBU: Kajian Statistik Sertifikasi Jasa Konstruksi dari Tahun ke Tahun

29

SERTIFIKASI & KOMPETENSI

Dari Sertifikasi ke Pembangunan: Peran Asesor yang Tak Tergantikan

32

PENILAI AHLI

Tantangan Independensi dan Pembiayaan Penilai Ahli Dalam Kasus Kegagalan Bangunan

36

AKREDITASI, KOLABORASI & INTERNASIONAL

Dukung Pelaksanaan MRA Bidang Desain Interior, LPJK Tindaklanjuti Kerjasama Dengan Filipina

DAFTAR ISI

AKREDITASI, KOLABORASI & INTERNASIONAL Dukung Tertib Penggunaan TKKA, LPJK bersama Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan TKKA di Lingkungan Kementerian PU	39
AKREDITASI, KOLABORASI & INTERNASIONAL Akreditasi Asosiasi : Membangun Kredibilitas di bidang Jasa Konstruksi	43
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) Menanamkan Moral K4 dan Etika Profesi dalam Pengembangan Karakter Sumber Daya Konstruksi yang Profesional	49
TEKNOLOGI & INOVASI Digitalisasi Sektor Konstruksi: Inovasi, Integrasi, dan Profesionalisme Bersama LPJK	54
RUBRIK NEWS & LIPUTAN Peran LPJK di IndoBuildTech 2025: Mendorong Profesionalisme dan Inovasi SDM Konstruksi	57
PROFIL & INSPIRING FIGURES Liputan Khusus : Tantangan, Peluang, dan Strategi Pengembangan Profesionalisme dalam Industri Jasa Konstruksi Indonesia	61
POJOK INTERAKTIF Teka-Teki Silang	65
FEATURE Gambaran Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Menghadapi Dinamika Jasa Konstruksi Masa Depan	67
LAYANAN & PANDUAN FAQ LPJK	73

SALAM REDAKSI BULETIN LPJK

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buletin LPJK Edisi Keempat dapat kembali hadir menyapa para pembaca di bulan Agustus 2025 ini. Pertama-tama, kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan terbitnya Buletin LPJK Edisi Keempat ini. Kami menyadari betapa pentingnya keberlangsungan informasi berkala, dan meski sempat tertunda, kami kembali hadir dengan semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

Pada edisi kali ini, kami mengangkat tema utama: **Membangun Profesionalisme & Kesiapan Jasa Konstruksi Masa Depan**. Tema ini lahir dari keprihatinan sekaligus optimisme kami terhadap tantangan dan perubahan besar yang tengah dan akan terus dihadapi sektor jasa konstruksi—baik dari sisi teknologi, regulasi, sumber daya manusia, maupun dinamika global. Di tengah era digitalisasi, keberlanjutan pembangunan, dan integrasi sistem informasi nasional, tuntutan terhadap profesionalisme dan kesiapan SDM serta lembaga semakin tinggi. Tak cukup hanya kompeten, pelaku usaha juga harus adaptif, inovatif, dan kolaboratif.

Melalui berbagai artikel dalam edisi ini, kami mencoba memotret kondisi aktual sektor konstruksi, merefleksikan capaian, serta menghadirkan gagasan-gagasan progresif sebagai inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap Buletin LPJK Edisi Keempat ini dapat menjadi wadah pembelajaran, refleksi, dan pertukaran ide demi mendukung kemajuan jasa konstruksi Indonesia yang berdaya saing dan berintegritas tinggi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buletin ini, serta kepada para pembaca yang senantiasa memberikan semangat dan kepercayaan kepada kami. Sebagai media informasi dan komunikasi publik, kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran konstruktif demi penyempurnaan buletin di masa mendatang.

**Salam hangat,
Pimpinan Redaksi Buletin LPJK**



Profesionalisme Jasa Konstruksi: Pilar Masa Depan Pembangunan Indonesia

oleh
Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc.
 Ketua LPJK

Sumber: Lomba Foto Konstruksi Indonesia 2019

PU 608

Kementerian PU menetapkan PU 608 sebagai program utama dan strategi dengan memposisikan peran PU sebagai *enabler* pertumbuhan ekonomi dengan 3 sasaran utama, yakni efisiensi investasi ICOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8% per tahun.

Pembangunan infrastruktur adalah fondasi bagi cita-cita besar Indonesia. Tanpa jalan, jembatan, dan gedung yang mumpuni, sulit rasanya membayangkan Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Di sinilah peran jasa konstruksi menjadi sangat vital. Keberhasilan pembangunan bukan hanya soal dana atau alat yang canggih, tapi juga soal profesionalisme para pelakunya, dari awal perencanaan sampai proyek selesai digunakan.

“Profesionalisme jasa konstruksi bukan sekadar urusan teknis, melainkan panggilan untuk mewujudkan mimpi besar bangsa”

Menghadapi Indonesia Emas 2045: Tantangan dan Solusi

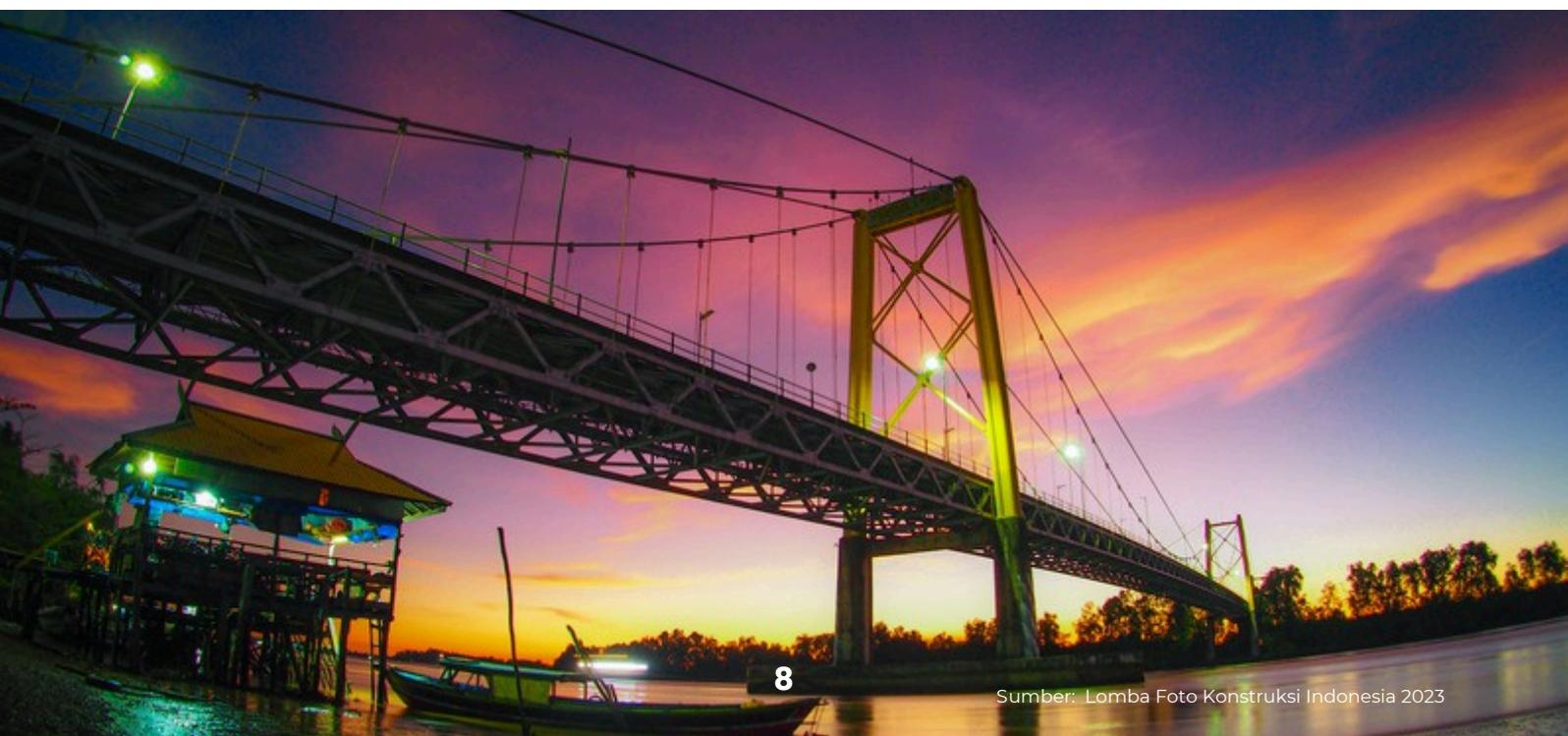
Menuju Indonesia Emas 2045, target ambisius yang harus kita capai di antaranya adalah menjadi negara berpenghasilan tinggi, pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, dan menghapus kemiskinan. Jasa konstruksi punya peran besar dalam mewujudkan mimpi ini. Mereka harus bisa membangun dengan kualitas terbaik, yang berarti proyek harus efisien, selesai tepat waktu, dan bermutu tinggi. Kualitas di sini bukan cuma soal kokohnya bangunan, tapi juga aman, selamat, sehat, dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan tujuan negara kita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

- Melindungi bangsa: Jasa konstruksi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, transportasi yang aman, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional.
- Kesejahteraan umum: Melalui pembangunan jalan, akses air bersih, perumahan, energi, dan irigasi yang merata, jasa konstruksi memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

- Mencerdaskan bangsa: Akses ke sekolah dan kampus menjadi lebih mudah dengan infrastruktur pendidikan yang layak.
- Keadilan sosial & ketertiban dunia: Jasa konstruksi membangun fasilitas kesehatan dan infrastruktur di wilayah perbatasan, memastikan semua lapisan masyarakat terlayani.

Semua pembangunan ini juga harus dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan wilayah, dan ramah lingkungan, demi menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang.

Pembangunan tidak terjadi di ruang kosong. Kondisi geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia sangat berpengaruh. Di sinilah infrastruktur berperan sebagai pengungkit transformasi. Infrastruktur mengubah potensi menjadi kekuatan produktif, menghubungkan penduduk, dan mempermudah akses ke berbagai layanan. Hasilnya, terciptalah kehidupan yang aman, nyaman, dan produktif.



Peran Strategis Jasa Konstruksi untuk Sasaran Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029 sudah menetapkan target yang jelas, dan jasa konstruksi menjadi motor penggerak utamanya. Mereka adalah ujung tombak pembangunan fisik yang menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Ada tiga peran utama yang diemban jasa konstruksi dalam mencapai target nasional:

1. Menurunkan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* dan Meningkatkan Efisiensi Investasi.

Bangunan yang efisien dan berkualitas akan memberikan dampak lebih besar dengan biaya lebih rendah. Dengan digitalisasi, seperti menggunakan teknologi Building Information Modelling (BIM), konstruksi modular, dan prefabrikasi, proyek bisa lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan mempercepat manfaat ekonomi.

2. Menghapus Kemiskinan Struktural.

Proyek konstruksi membuka banyak lapangan kerja, terutama untuk masyarakat rentan. Setiap proyek tidak hanya menciptakan peluang kerja langsung, tapi juga memicu efek berantai yang positif. Selain itu, proyek juga memperbaiki akses masyarakat ke infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, yang menjadi fondasi pemerataan pembangunan.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Infrastruktur yang dibangun oleh jasa konstruksi meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong produktivitas industri, termasuk bagi UMKM. Proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan bendungan menjadi pilar daya saing nasional.

Tantangan yang Harus Dihadapi

Untuk terus maju, jasa konstruksi harus mengatasi beberapa tantangan besar:

- **Inovasi Pembiayaan:** Agar proyek tetap berjalan tanpa terhambat perubahan kebijakan, diperlukan alternatif pembiayaan yang inovatif. Ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau memanfaatkan instrumen fiskal seperti sukuk infrastruktur.
- **Transformasi Teknologi dan Digitalisasi:** Teknologi mengubah segalanya. Jasa konstruksi harus beradaptasi dengan digitalisasi proses desain, otomatisasi, penggunaan material inovatif, serta integrasi teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, dan *Artificial Intelligence (AI)*. Ini juga termasuk digitalisasi sertifikasi dan regulasi.

- Tuntutan Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan: Pembangunan kini harus memperhatikan kelestarian alam. Ini artinya, proyek harus efisien energi, menggunakan material daur ulang, mengurangi jejak karbon, serta melindungi ekosistem.
- Tingginya Angka Kecelakaan Kerja: Sektor konstruksi masih menjadi salah satu yang paling rawan kecelakaan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 sering dianggap sebagai formalitas, padahal seharusnya menjadi etos kerja. Banyak pekerja di lapangan yang mengabaikan prosedur aman dan penggunaan alat pelindung diri.

“Profesionalisme jasa konstruksi bukanlah sekadar urusan teknis, melainkan sebuah panggilan untuk mewujudkan mimpi besar bangsa.”

Setiap proyek yang kita bangun, mulai dari jembatan kokoh yang menghubungkan dua pulau hingga bendungan yang mengairi ribuan hektar sawah, adalah wujud nyata dari komitmen kita untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan bangsa. Tantangan yang kita hadapi, baik itu inovasi pembiayaan, adopsi teknologi, tuntutan lingkungan, maupun keselamatan kerja, sejatinya adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik.

Di balik setiap beton yang dicor dan baja yang terpasang, ada harapan jutaan masyarakat yang menantikan perubahan. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap langkah dalam proses konstruksi sebagai sebuah karya yang lahir dari profesionalisme tertinggi. Mari kita berkolaborasi, berinovasi, dan menjunjung tinggi integritas. Mari kita ubah setiap risiko menjadi peluang, setiap tantangan menjadi kekuatan.

Masa depan Indonesia Emas 2045 bukan hanya sebuah visi di atas kertas. Ia adalah bangunan yang kita dirikan bersama, dengan keringat dan dedikasi. Dengan profesionalisme yang tak kenal lelah, kita akan memastikan bahwa fondasi pembangunan ini kokoh, bangunannya aman, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke. Mari kita terus bergerak, membangun, dan menginspirasi, karena di tangan kitalah masa depan pembangunan Indonesia berada.





Transformasi Digital e-SIMPAN dalam Layanan Sertifikasi dan Pencatatan Pengalaman

Penulis:

Andi Ahmad Hardiman, S.S.T., Nur Indah Septianingsih, S.T.,
Muhammad Zaim Hadi S.ST.
LPJK, Bidang Pencatatan dan Rekomendasi Lisensi LSP

Dalam era digital saat ini, modernisasi layanan menjadi kebutuhan mendesak bagi lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam modernisasi layanan publik, termasuk dalam sektor jasa konstruksi. Salah satu bentuk transformasi ini adalah kehadiran e-SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan Pengalaman), sebuah subsistem dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) yang dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk mendukung pelaksanaan layanan pencatatan pengalaman secara digital.

e-SIMPAN merupakan inovasi penting dalam transformasi digital LPJK. Sistem ini menggantikan proses manual yang selama ini menjadi kendala, baik dari sisi waktu, biaya, maupun potensi penyimpangan data. Dengan e-SIMPAN, data pengalaman kerja badan usaha dan tenaga kerja konstruksi dapat dicatat secara sistematis dan terdigitalisasi, serta terintegrasi dengan layanan sertifikasi seperti SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) dan SBU (Sertifikat Badan Usaha). Melalui e-SIMPAN, proses pencatatan pengalaman Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi dilakukan secara

daring dan efisien, sesuai dengan amanat regulasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 6V dan 6X.

Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib mencatatkan pengalaman proyeknya kepada Pemerintah Pusat melalui LPJK. Pencatatan tersebut meliputi nama paket pekerjaan, nama pengguna jasa, komposisi Kerja Sama Operasional (KSO) jika ada, durasi dan tahun pelaksanaan, nilai pekerjaan, dan berita acara serah terima.

SBU diberikan kepada badan usaha berdasarkan klasifikasi, kualifikasi, dan pengalaman kerja. e-SIMPAN mencatat seluruh riwayat proyek yang telah dikerjakan oleh badan usaha, lengkap dengan nilai proyek, lingkup pekerjaan, dan data teknis lainnya. Data pengalaman dalam e-SIMPAN menjadi acuan dalam menentukan kualifikasi SBU karena kualifikasi sangat ditentukan oleh jumlah dan nilai proyek yang pernah diselesaikan.

Hal yang sama juga berlaku untuk Tenaga Kerja Konstruksi, yang diwajibkan

mencatatkan pengalaman profesionalnya melalui LPJK. Data yang dicatat setidaknya mencakup jenis layanan profesional, nilai pekerjaan konstruksi yang terkait, durasi dan tahun pelaksanaan, serta nama pengguna jasa.

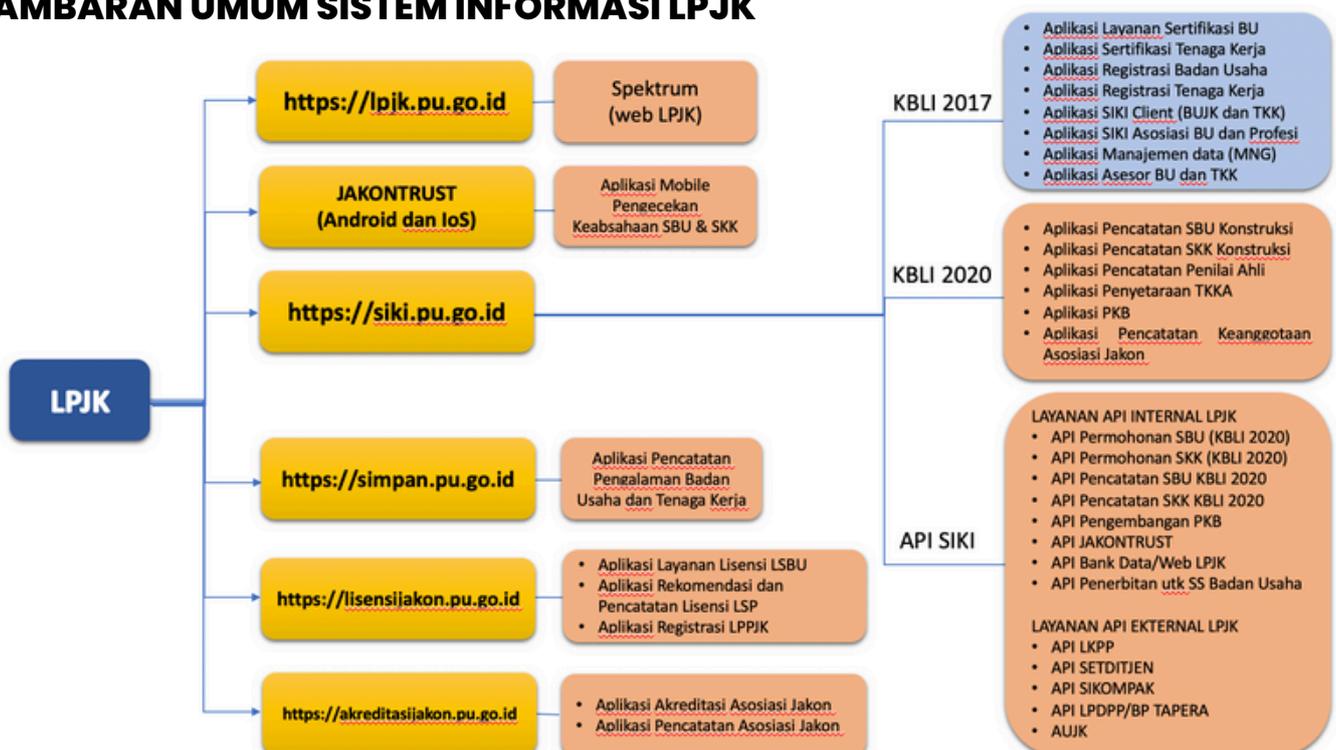
Sebelum hadirnya e-SIMPAN, pencatatan pengalaman kerja tenaga kerja dan badan usaha konstruksi sering kali dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap manipulasi data dan duplikasi. Dengan e-SIMPAN, semua data pengalaman disimpan secara terpusat. e-SIMPAN hadir untuk mentransformasi proses tersebut menjadi digital dan terpusat.

“Digitalisasi memperkuat profesionalisme dan menciptakan ekosistem konstruksi yang lebih modern dan kompetitif”

“Data pengalaman yang tercatat menjadi fondasi bagi perbaikan tata kelola jasa konstruksi nasional.”

Pengalaman yang dicatat dalam e-SIMPAN merupakan bentuk *self declare* atau pernyataan mandiri oleh yang bersangkutan, baik itu badan usaha maupun tenaga kerja. Artinya, tanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan pengalaman tersebut sepenuhnya berada pada pihak yang mencatat. Data pengalaman yang telah tercatat dalam sistem akan diverifikasi dan divalidasi secara uji petik oleh LPJK. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau data palsu, maka baik Badan Usaha maupun Tenaga Kerja Konstruksi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alur Uji Petik dapat dilihat pada Tabel 1.

GAMBARAN UMUM SISTEM INFORMASI LPJK



ALUR UJI PETIK

NO.	TAHAPAN	LPJK	TIM UJI PETIK	PENGGUNA JASA	BUJK/TKK	LSBU/LSP	MASYARAKAT
1.	LPJK membentuk Tim Pelaksana Uji Petik	MULAI					
2.	Penetapan Jadwal Pelaksanaan uji petik terjadwal atau berdasarkan laporan pengaduan						PENGADUAN
3.	Pemilihan sampel dari data pencatatan pengalaman yang sudah submit						
4.	Sekretariat Tim Uji Petik mengambil sampel dengan cara mengunduh data pendukung dari SIMPAN						
5.	Sekretariat Tim Uji Petik melaksanakan verifikasi terhadap sampel pengalaman						
6.	Pelaksana Tim Uji Petik melakukan klarifikasi kepada pengguna jasa berupa klarifikasi tertulis dan/atau kunjungan lapangan (jika diperlukan)						
7.	Pelaksana Tim Uji Petik melakukan klarifikasi kepada pengguna jasa berupa klarifikasi tertulis dan/atau kunjungan lapangan (jika diperlukan)						
8.	Pelaksana Tim Uji Petik menetapkan hasil uji petik untuk setiap sampel pengalaman	10 Hari					
9.	Tim Uji Petik menyusun laporan pelaksanaan uji petik dan disampaikan kepada Ketua LPJK						
10.	Ketua LPJK menyampaikan laporan pelaksanaan uji petik kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi	5 Hari					
11.	LPJK menindaklanjuti hasil uji petik pengalaman						
12.	LPJK menginformasikan kepada BUJK/TKK perlunya dilakukan perbaikan pengalaman				5 Hari		
13.	LPJK menginformasikan peringatan kepada BUJK/TKK terhadap pengalaman tidak benar				5 Hari		
14.	LPJK menghapus pengalaman yang dinyatakan tidak benar	5 Hari Selesai					5 Hari
15.	LPJK menginformasikan kepada LSP/LSBU untuk memberikan sanksi terhadap pengalaman yang dinyatakan tidak benar						
16.	LPJK melakukan monitoring kepada LSP/LSBU atas tindak lanjut pengalaman yang tidak benar						Selesai

Tabel 1 Alur Uji Petik

Data e-SIMPAN per tanggal 10 Juli 2025 menunjukkan jumlah TKK Ahli yang melakukan input sebanyak 134.359 orang dengan jumlah pengalaman yang di-submit sebanyak 1.290.371 pengalaman. Pada data TKK Terampil menunjukkan 211.864 orang yang telah melakukan input data dan 731.154 pengalaman yang di-submit. Jumlah BUJK yang melakukan input data sebanyak 15.837 orang dengan jumlah pengalaman yang di-submit sebanyak 167.582 pengalaman. Masing-masing data tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1,3% hingga 5% dari data bulan sebelumnya per tanggal 10 Juli 2025. Data ini menunjukkan tren positif dalam partisipasi input dan pelaporan pengalaman kerja konstruksi melalui e-SIMPAN sebagai bagian dari sistem digitalisasi layanan LPJK.

Reformasi layanan jasa konstruksi menuntut sistem yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Dalam konteks ini, e-SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengalaman) memiliki peran strategis sebagai tulang punggung digitalisasi pencatatan pengalaman kerja di sektor konstruksi. Melalui pendekatan berbasis data yang terdokumentasi secara elektronik, e-SIMPAN mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola layanan jasa konstruksi di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan jasa konstruksi, e-SIMPAN memiliki peran strategis sebagai pusat pencatatan data pengalaman kerja tenaga kerja dan badan usaha konstruksi. Salah satu kontribusi utamanya adalah dalam menghindari duplikasi data dan memperkuat integrasi sistem antar layanan di lingkungan LPJK.

DATA INPUT e-SIMPAN

Data Juli 2025



Sumber: Monev LPJK, Juli 2025

“Transformasi digital ini telah memungkinkan integrasi e-SIMPAN dengan Portal Perizinan PU, khususnya dalam mendukung layanan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K)”.

Transformasi digital ini telah memungkinkan integrasi e-SIMPAN dengan Portal Perizinan PU, khususnya dalam mendukung layanan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K). Dalam proses permohonan SKK-K, pencatatan pengalaman kerja menjadi salah satu persyaratan dasar pemohon. Oleh karena itu, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip digital, tetapi juga sebagai bagian penting dari verifikasi administratif dalam perizinan. Dalam proses permohonan SBU, rekam jejak pengalaman proyek menjadi salah satu elemen kunci dalam menilai kualifikasi dan klasifikasi usaha. Melalui e-SIMPAN, data pengalaman proyek yang telah dicatat secara digital dan terdokumentasi dengan baik dapat langsung ditarik dalam sistem perizinan. Hal ini menegaskan pentingnya pencatatan pengalaman sejak dini dan secara benar oleh para tenaga kerja maupun pelaku usaha konstruksi.

Dengan demikian, pengembangan dan integrasi e-SIMPAN bukan hanya sekadar transformasi teknologi, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam

membangun ekosistem layanan sertifikasi dan pencatatan pengalaman yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selain digunakan sebagai dasar dalam proses Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K), data pengalaman yang tercatat dalam e-SIMPAN juga dimanfaatkan dalam proses tender pekerjaan-konstruksi, sebagai bukti kemampuan dan rekam jejak profesional tenaga kerja maupun badan usaha. Sistem ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi perbaikan tata kelola jasa konstruksi nasional ke depan.

Digitalisasi dalam sektor konstruksi membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Bagi SDM, digitalisasi mempermudah akses terhadap pelatihan dan sertifikasi kompetensi, mendorong penguasaan teknologi baru, serta mengubah pola kerja menjadi lebih berbasis data dan teknologi. Sementara itu, bagi BUJK, digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional, transparansi manajerial, serta daya saing usaha melalui penggunaan sistem informasi, perangkat lunak manajemen proyek, dan integrasi data layanan konstruksi. Secara keseluruhan, digitalisasi memperkuat profesionalisme, mempercepat transformasi industri, dan menciptakan ekosistem konstruksi yang lebih modern dan kompetitif.



Ke depan, transformasi digital e-SIMPAN diharapkan dapat semakin memperkuat akurasi data pengalaman kerja yang tercatat. Sistem ini diharapkan mampu melakukan pencatatan secara menyeluruh terhadap riwayat pekerjaan yang telah dilakukan, baik oleh individu pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) maupun badan usaha pemegang Sertifikat Badan Usaha (SBU). Dengan demikian, proses penilaian terhadap kelayakan kompetensi dan kualifikasi usaha dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan efisien.

Transformasi e-SIMPAN diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam mewujudkan tata kelola jasa konstruksi yang lebih modern, kredibel, dan berbasis data. Tidak hanya memberikan manfaat administratif, e-SIMPAN juga memainkan peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan badan usaha, sekaligus memperkuat daya saing industri konstruksi nasional dalam menghadapi tantangan global.



Mengurai Proses Bisnis SIKI: Fondasi Menuju Pengadaan yang Lebih Cerdas

Penulis:

Annik Noer Nawarni, S.E.,
 Rivaldo, S.E., M.Ak.,
 Kurnia Amonito, S.Kom.,
 Muhammad Arief Previasakti Suradi, S.Kom
 LPJK, Bidang Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK

Dalam era transformasi digital, industri jasa konstruksi nasional memasuki babak baru yang menuntut transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Menjawab kebutuhan ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengembangkan SIJKT (Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi) sebagai tulang punggung ekosistem digitalnya. SIJKT dirancang sebagai platform terintegrasi untuk mendukung tata kelola perizinan, pembinaan, pengawasan, serta pengambilan kebijakan berbasis data dalam bidang jasa konstruksi. Salah satu platform yang terintegrasi dengan SIJKT adalah SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia) yang dikelola oleh LPJK dalam rangka pencatatan Sertifikat Badan Usaha (SBU), pencatatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, Validasi SBU dan SKK, serta sinkronisasi data dengan sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha.

Secara praktis, sistem ini menggantikan proses manual yang rentan terhadap inkonsistensi dan membuka akses data yang relevan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap jejak

kinerja, baik positif maupun negatif, tercatat secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif.

DASAR HUKUM

- UU No. 2 Tahun 2017
- PP No. 22 Tahun 2020
- PP No. 14 Tahun 2021
- Permen PUPR No. 8 Tahun 2022

Implementasi ekosistem digital ini ditopang oleh arsitektur hukum yang komprehensif. Fondasi utamanya adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengamanatkan pembentukan sistem informasi modern dan terintegrasi secara nasional. Amanat ini kemudian diterjemahkan ke dalam kerangka kerja yang lebih konkret melalui peraturan pelaksanaannya.

Pilar operasionalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 (sebagaimana diubah dengan PP No. 14 Tahun 2021) yang merinci mekanisme sertifikasi dan registrasi. Sementara itu, detail teknis alur kerja digital untuk memperoleh SBU dan SKK dipetakan secara presisi dalam Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022, yang memastikan integritas data yang masuk ke SIKI. Kombinasi regulasi ini menciptakan landasan yang solid untuk operasional SIKI.

Bagaimana Proses SIKI Bekerja?

SIKI bekerja sebagai platform digital terintegrasi yang mengelola data sertifikat pelaku usaha jasa konstruksi secara nasional. Proses untuk memperoleh sertifikat dan perizinan dalam ekosistem SIKI merupakan sebuah pergeseran paradigma, beralih dari alur kerja birokratis yang terfragmentasi ke sebuah perjalanan digital yang terstruktur, transparan, dan melibatkan orkestrasi antar-platform untuk menjamin integritas data dari hulu ke hilir.

Alur Penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Perjalanan untuk mendapatkan SBU, dimulai dari fondasi legalitas nasional. Pelaku usaha pertama-tama wajib mendaftarkan entitasnya di sistem *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah ini krusial karena mengintegrasikan identitas bisnis mereka dengan sistem perizinan nasional. Setelah itu, mereka memasuki gerbang ekosistem konstruksi melalui portal perizinan PUPR untuk mengajukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Pada tahap ini, pemohon memilih Asosiasi Badan Usaha yang akan menaunginya dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang akan melakukan penilaian independen.

Selanjutnya, pemohon membangun "profil digital" perusahaannya dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung secara komprehensif, mencakup aspek legalitas, keuangan, penjualan tahunan, data tenaga kerja, penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), hingga kapasitas peralatan. Pengisian data kontrak pengalaman, tenaga kerja dan peralatan tidak lagi dilakukan secara manual, menggunakan data yang sudah tercatat pada sistem SIKI, e-SIMPAN dan SIMPK. Profil ini kemudian menjadi subjek verifikasi dan asesmen oleh LSBU. Setelah kewajiban finansial dipenuhi, asesor profesional melakukan uji tuntas (*due diligence*) untuk menilai kapasitas nyata perusahaan sebelum memberikan rekomendasi. Tahap akhir dari alur ini adalah pencatatan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai registrasi utama. Setelah disetujui, hasil penetapan dikirim ke LPJK, dan sistem SIKI secara otomatis mencatat SBU tersebut ke dalam basis data pusat, lalu menerbitkannya dalam format digital yang aman.

"SIKI mengubah sertifikat dari sekadar dokumen statis menjadi aset digital yang hidup & terpercaya"

Alur Penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)

Prinsip yang sama berlaku untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) bagi para tenaga kerja konstruksi. Dalam proses ini, peran penilai dijalankan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kompetensi yang teruji sesuai dengan standar keahlian yang relevan.

Integrasi Antar Sistem

Penting untuk dipahami bahwa SIKI tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem data yang terintegrasi untuk menjamin validitas. Saat ini, keabsahan data pengalaman tidak lagi bergantung pada klaim sepihak (*self-declare*), melainkan bersumber langsung dari SIKOMPAK, tempat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pengguna jasa memvalidasi kinerja pelaksanaan kontrak.

Data yang telah terverifikasi ini kemudian diintegrasikan secara otomatis ke dalam SIMPAN (Sistem Informasi Pengalaman), sehingga membentuk rekam jejak digital yang akuntabel dan menjadi dasar penilaian yang kredibel dalam proses sertifikasi sebelum SBU dan SKK dicatatkan secara resmi di SIKI.

Dalam perizinan berusaha, proses penerbitan Sertifikat Standar (SS), SIKI berperan sebagai sistem validasi utama yang memastikan keabsahan SBU terpenuhi. SIKI melakukan validasi otomatis kesesuaian NIB, KBLI, subklasifikasi dan status SBU.

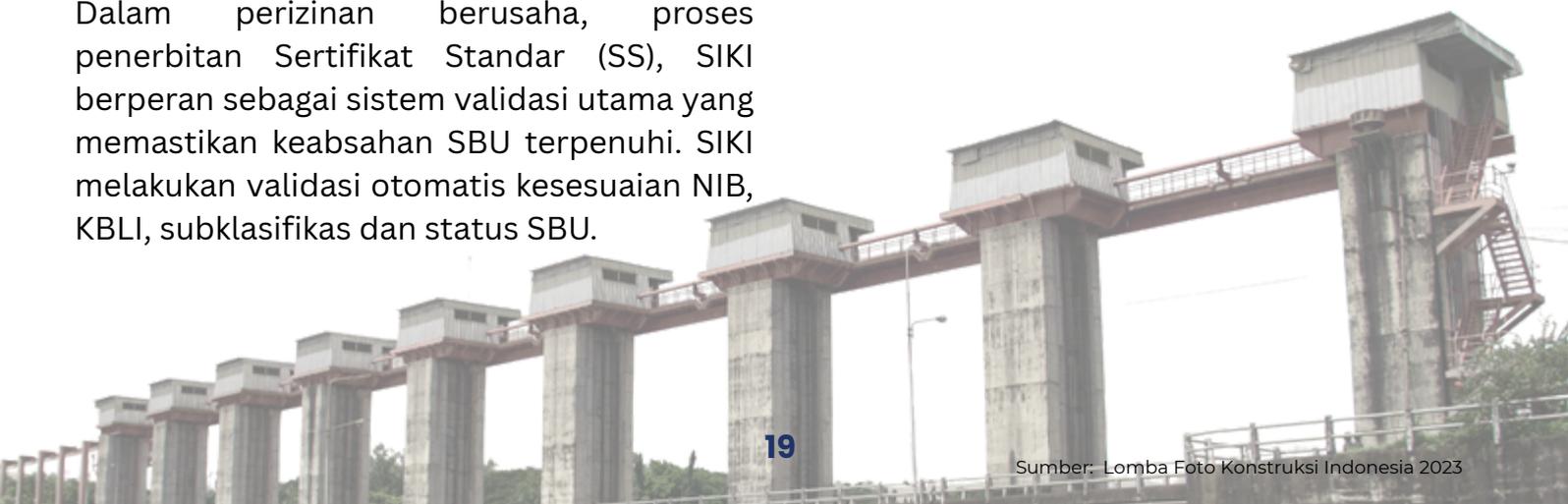
Verifikasi dan Validasi

Puncak dari arsitektur kepercayaan ekosistem SIKI terletak pada mekanisme validasi dan penjaminan mutunya, yang dirancang untuk mengubah sertifikat dari sekadar dokumen statis menjadi aset digital yang hidup dan terpercaya. Untuk mencapai hal ini, SIKI menerapkan pendekatan dua lapis yang saling menguatkan: verifikasi teknis dan transparansi publik.

Pertama, setiap sertifikat digital dibenamkan QR Code yang berfungsi sebagai kunci otentikasi dinamis; saat dipindai, kode ini secara instan terhubung ke basis data pusat untuk menyajikan status keabsahan sertifikat secara real-time, sehingga efektif memitigasi risiko pemalsuan.

Kedua, sebagai manifestasi akuntabilitas, SIKI menyediakan portal pencarian terbuka yang memungkinkan siapa pun, mulai dari panitia tender, mitra bisnis, hingga masyarakat luas untuk melakukan verifikasi mandiri terhadap status aktif sebuah SBU atau SKK.

Kombinasi antara kunci verifikasi digital yang aman dan akses publik yang transparan ini menciptakan sebuah benteng integritas yang kokoh, memastikan data dalam ekosistem SIKI selalu dapat diandalkan.



Menuju Pengadaan Barang dan Jasa yang Terintegrasi

Setelah sukses membangun SIKI sebagai basis data kinerja yang andal, langkah evolusi berikutnya dalam digitalisasi pengadaan adalah membongkar sekat-sekat sistem yang selama ini masih berdiri sendiri. Untuk itu, sebuah imperatif strategis yang kini mengemuka adalah mengorkestrasi integrasi data Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari SIKI secara *seamless* (tanpa hambatan) dengan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

**Integrasi SIKI-LPSE
menghilangkan
potensi
pemalsuan dan
inkonsistensi
dokumen.**

Realisasi gagasan ini akan memicu efek ganda (*multiplier effect*) yang fundamental bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi panitia pengadaan (Pokja), ini berarti sebuah pergeseran fokus yang krusial: dari yang tadinya disibukkan oleh verifikasi dokumen administratif yang repetitif, kini mereka dapat mengalokasikan waktu dan energi untuk melakukan evaluasi substansi teknis yang lebih mendalam. Sistem LPSE akan secara otomatis menjadikan SIKI sebagai

satu-satunya sumber kebenaran data (*single source of truth*), yang tidak hanya menarik data kualifikasi tetapi juga menghilangkan potensi pemalsuan dan inkonsistensi.

Bagi para penyedia jasa, proses tender menjadi jauh lebih adil dan efisien. Kewajiban unggah dokumen kualifikasi secara manual diadakan, dan validasi kesesuaian subklasifikasi serta masa berlaku sertifikat dilakukan oleh sistem secara real-time. Hal ini secara signifikan meminimalkan risiko diskualifikasi akibat kelalaian administratif dan menciptakan arena kompetisi yang berlandaskan pada kapabilitas nyata, bukan sekadar ketelitian dalam menyusun dokumen.

Secara yuridis, langkah inovatif ini sesungguhnya telah diantisipasi dan difasilitasi oleh kerangka regulasi yang ada. Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP Nomor 12 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 19 ayat (2), secara eksplisit membuka pintu bagi mekanisme verifikasi kualifikasi melalui sistem informasi yang sah, dan SIKI adalah manifestasi konkret dari sistem tersebut.

Dengan demikian, integrasi SIKI-LPSE bukanlah sekadar pembaruan teknis. Ini adalah sebuah langkah transformatif yang mengubah paradigma pengadaan dari proses administratif menjadi fungsi strategis untuk memilih mitra terbaik, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas infrastruktur yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Mengapa Penting untuk Mendorong Integrasi?

Mewujudkan integrasi antara SIKI dan LPSE akan memberikan dampak transformatif pada tiga area utama. Pertama, terciptanya efisiensi proses pengadaan yang signifikan. Waktu dan sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk evaluasi manual dokumen kualifikasi dapat dieliminasi, sehingga mempercepat siklus pengadaan secara keseluruhan. Kedua, kredibilitas proses seleksi akan meningkat tajam. Karena seluruh data kualifikasi bersumber langsung dari sistem resmi yang tervalidasi, integritas proses menjadi lebih terjamin dan sulit untuk diintervensi.

Ketiga, dan yang terpenting, integrasi ini memungkinkan transformasi menuju seleksi berbasis kinerja nyata. Penilaian tidak lagi hanya bersandar pada kelengkapan dokumen formal, tetapi juga pada rekam jejak aktual penyedia jasa yang tercatat di SIKI, memastikan pemenang tender adalah mereka yang benar-benar memiliki kapabilitas teruji.

Namun, terlepas dari urgensinya, realisasi visi ini masih menghadapi beberapa tantangan fundamental. Dari sisi teknis, kendala utamanya adalah keterbatasan jalur pertukaran data (API) dan perbedaan arsitektur platform antara SIKI dan LPSE yang perlu dijembatani. Sementara dari sisi regulasi, hingga kini belum ada peraturan turunan yang secara eksplisit mengatur skema interoperabilitas data antar sistem. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang perlu segera diatasi agar ada payung hukum yang jelas bagi implementasi teknis.

Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PU, LKPP, dan para pengembang sistem menjadi kunci untuk merumuskan solusi teknis dan kerangka regulasi yang dibutuhkan.

Dari Wacana Ke Aksi

Secara fundamental, proses bisnis dan infrastruktur data SIKI telah matang dan siap menjadi pilar utama dalam pengadaan berbasis kinerja. Melalui kapabilitas intinya, mulai dari pencatatan dan registrasi SBU/SKK hingga pengelolaan rekam jejak digital yang terverifikasi, SIKI telah membangun fondasi yang kokoh. Oleh karena itu, tantangan sesungguhnya kini bergeser dari pengembangan internal ke eksternal: yaitu menjembatani aset data berharga ini ke dalam ekosistem pengadaan barang/jasa nasional melalui LPSE.

Pada akhirnya, mendorong integrasi SIKI dan LPSE bukanlah sekadar wacana teknis, melainkan sebuah langkah strategis dan konkret. Ini adalah manifestasi nyata dari upaya mewujudkan sistem pengadaan jasa konstruksi yang modern, transparan, dan kredibel. Lebih dari itu, langkah ini sepenuhnya sejalan dengan agenda besar transformasi digital sektor publik yang dicanangkan pemerintah, menempatkan sektor konstruksi Indonesia di jalur yang tepat menuju praktik terbaik tingkat dunia.

Dinamika Perkembangan SKK dan SBU: Kajian Statistik Sertifikasi Jasa Konstruksi dari Tahun ke Tahun

Penulis:

Andi Ahmad Hardiman, S.S.T., Nur Indah Septianingsih, S.T.,
 Fadly Faturrohman, S.Kom.
 LPJK, Bidang Pencatatan dan Rekomendasi Lisensi LSP

Perkembangan sistem sertifikasi dalam sektor jasa konstruksi di Indonesia mengalami berbagai dinamika dari tahun ke tahun seiring dengan perubahan regulasi, kebijakan, dan penyesuaian sistem klasifikasi baku yang digunakan dalam pencatatan. **Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan dua komponen utama dalam sistem sertifikasi yang dikelola melalui regulasi pemerintah dan peran aktif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).** SKK dan SBU sangat penting dalam industri konstruksi karena keduanya memberikan pengakuan resmi atas kemampuan dan legalitas perusahaan serta tenaga kerjanya. SKK membuktikan seorang tenaga kerja telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, sementara SBU membuktikan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan untuk beroperasi secara sah. Seiring perkembangan kebijakan dan digitalisasi layanan publik, jumlah penerbitan SKK dan SBU ini mengalami dinamika yang menarik untuk ditelaah dari perspektif statistik dan kebijakan.

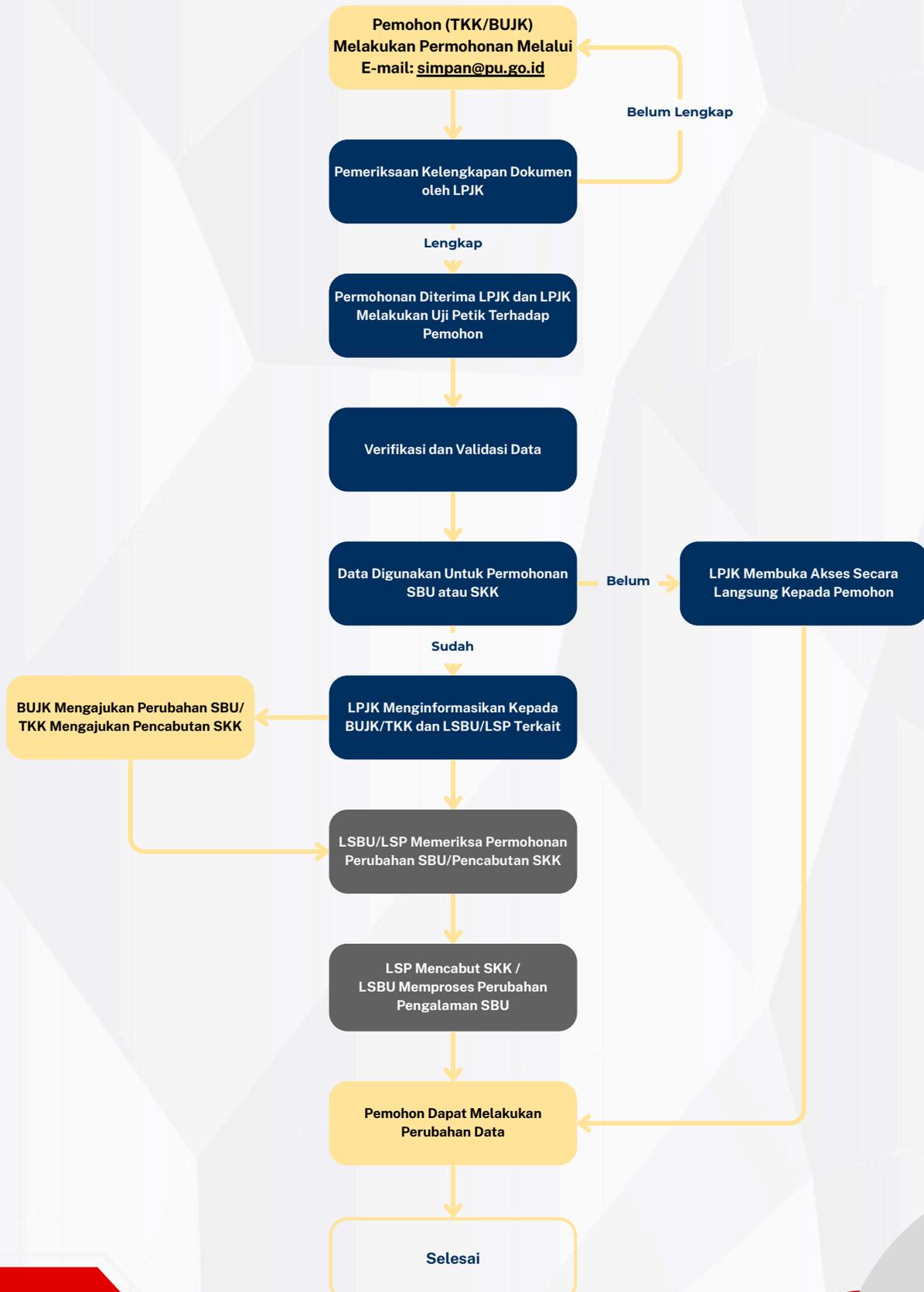
Dinamika SKK: Lonjakan, Penurunan, dan Pemulihan

Data menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi mengalami peningkatan signifikan pada tahun-tahun awal LPJK Kementerian PU dibentuk. Pada 2020, terdapat 688.334 tenaga kerja konstruksi dengan 991.232 sertifikat. Angka ini terus meningkat hingga 2021, mencapai 748.505 tenaga kerja dan 1.066.394 sertifikat.

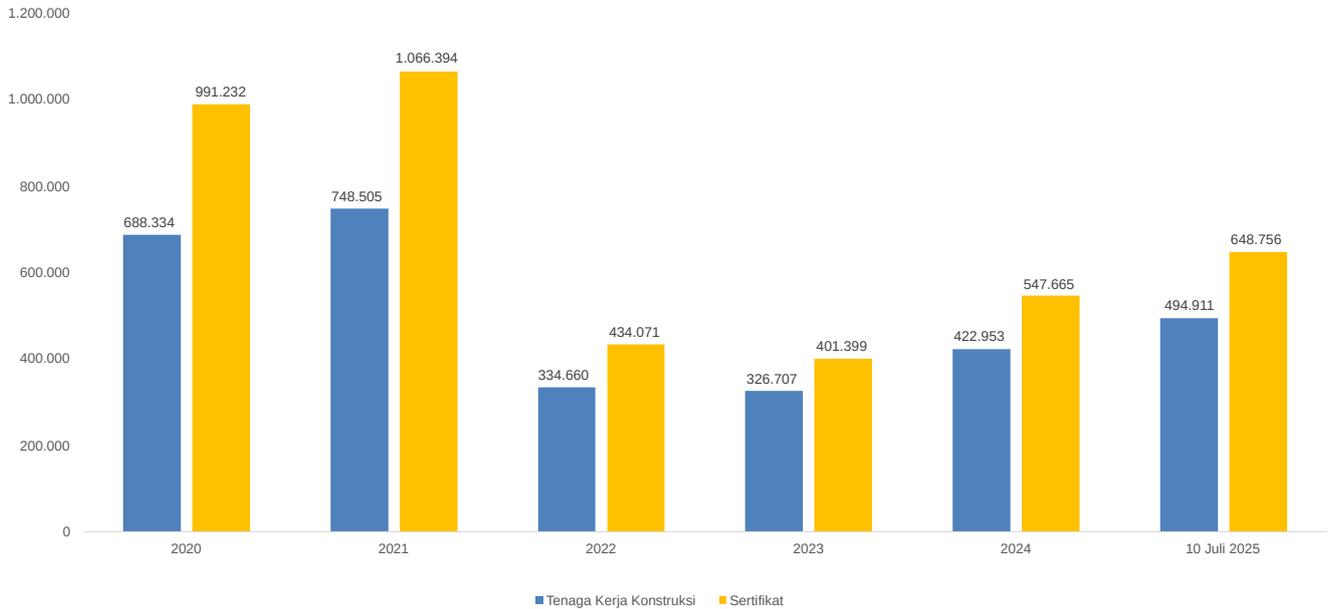
Namun, tahun 2022 menjadi titik balik yang menunjukkan penurunan drastis. Hanya tercatat 334.660 tenaga kerja dengan 434.071 sertifikat. Penurunan ini berlanjut ke tahun 2023, di mana hanya 326.707 tenaga kerja dan 401.399 sertifikat yang tercatat. Baru pada 2024 dan pertengahan 2025 terlihat adanya pemulihan, dengan masing-masing 422.953 dan 494.911 tenaga kerja, serta 547.665 dan 648.756 sertifikat hingga 10 Juli 2025.



ALUR PERUBAHAN DATA E-SIMPAN



Tren Perubahan Sertifikat dan Tenaga Kerja Konstruksi



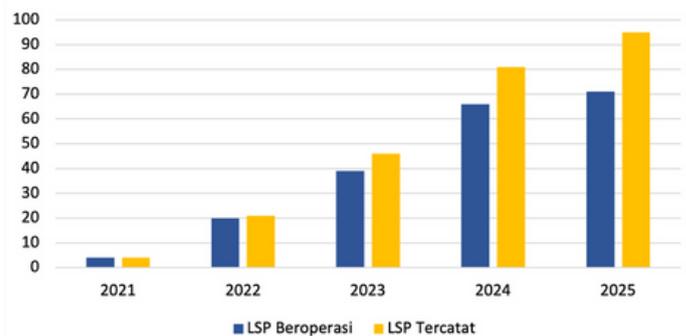
Sumber: Monev LPJK, Juli 2025

Salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan tajam pada 2022 adalah perubahan mekanisme sertifikasi. Sertifikasi kompetensi kerja beralih sepenuhnya dari sistem lama ke sistem Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Pada masa transisi ini, jumlah LSP yang tersedia masih sangat terbatas sehingga kapasitas layanan sertifikasi tidak dapat mengimbangi kebutuhan yang ada.

Dalam kurun waktu lima tahun, terdapat tren peningkatan jumlah LSP yang cukup signifikan hingga tahun 2024. Tahun 2021 dimulai dengan 4 LSP yang tercatat, kemudian terjadi lonjakan di tahun-tahun berikutnya hingga berjumlah 95 LSP per Juli 2025. Meskipun jumlah LSP meningkat dari tahun ke tahun, tidak semua LSP langsung beroperasi. Pada awalnya, hampir seluruh LSP yang didirikan langsung aktif, seperti terlihat pada tahun 2021 dan 2022, di mana hanya 1 dari 17 LSP yang belum beroperasi.

Namun sejak 2023, jumlah LSP yang belum beroperasi terus meningkat. Secara kumulatif, hingga tahun 2025 terdapat 95 LSP yang telah dibentuk. Dari jumlah tersebut 71 LSP telah beroperasi, sedangkan 24 LSP masih belum beroperasi. Hal ini menunjukkan sekitar 25% dari keseluruhan LSP masih belum menjalankan fungsinya.

Tren Jumlah LSP



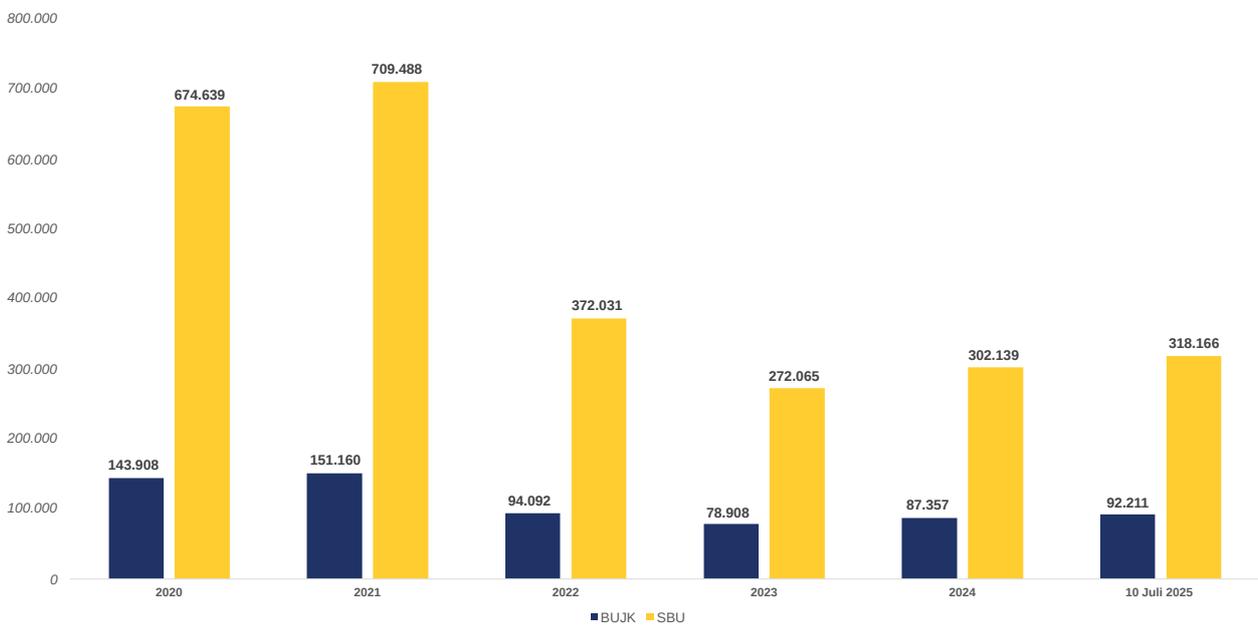
Sumber: Monev LPJK, Juli 2025

Secara umum, tren peningkatan jumlah LSP mendukung percepatan penerbitan SKK, namun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kualitas kelembagaan, distribusi wilayah, dan adaptasi terhadap sistem digital nasional. Selain itu, regulasi baru yang membatasi jumlah kepemilikan SKK oleh satu individu maksimal lima SKK juga berpengaruh besar. Pembatasan ini diberlakukan sebagai upaya menjaga kualitas, akuntabilitas, dan spesialisasi tenaga kerja tersertifikasi agar setiap sertifikat benar-benar mencerminkan kompetensi yang dimiliki dan dijalankan secara profesional.

Dinamika SBU dan BUJK: Dampak Alih Sistem dan Penyesuaian KBLI

Perjalanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) juga menunjukkan tren yang serupa. Pada tahun 2020, terdapat 143.908 Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memiliki total 674.639 SBU. Angka ini meningkat hingga 2021 menjadi 151.160 BUJK dengan 709.488 SBU. Namun pada 2022, terjadi penurunan tajam ke 94.092 BUJK dengan 372.031 SBU, yang terus merosot pada 2023 menjadi hanya 78.908 BUJK dan 272.065 SBU.

Tren Perubahan SBU dan BUJK



Sumber: Monev LPJK, Juli 2025

Penurunan yang terjadi pada tahun 2023 berkaitan erat dengan proses penyesuaian klasifikasi bidang usaha dari KBLI 2017 ke KBLI 2020. Banyak badan usaha yang harus melakukan pembaruan data dan adaptasi dengan klasifikasi baru, sehingga memperlambat proses penerbitan atau pembaruan SBU. Beberapa badan usaha juga tidak segera melakukan proses registrasi ulang akibat kurangnya pemahaman terhadap perubahan tersebut.

Di sisi lain, perubahan klasifikasi KBLI dari versi 2017 ke KBLI 2020 turut menciptakan dinamika baru. Penyesuaian ini memerlukan pemutakhiran pada sistem perizinan dan sinkronisasi antarlembaga, termasuk dalam penyesuaian nomenklatur dan subbidang pekerjaan konstruksi yang berpengaruh terhadap Sertifikasi Badan Usaha (SBU). Proses adaptasi terhadap KBLI 2020 membutuhkan waktu, baik dari sisi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), asosiasi badan usaha, maupun pelaku usaha yang akhirnya juga memberikan dampak pada jumlah SBU yang berhasil diterbitkan pada masa tersebut.

Pada tahun 2024 dan pertengahan 2025 terlihat tren pemulihan. Tahun 2024 mencatat 87.357 BUJK dengan 302.139 SBU, dan hingga 10 Juli 2025 tercatat 92.211 BUJK dengan 318.166 SBU. Sejak tahun 2023, dinamika penerbitan SBU sangat bergantung pada ketersediaan dan kinerja LSBU di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023, tercatat hanya terdapat 4 LSBU yang aktif dan terakreditasi secara resmi. Terbatasnya jumlah lembaga ini berdampak langsung terhadap jumlah SBU yang berhasil diterbitkan, yakni hanya 272.065 SBU.

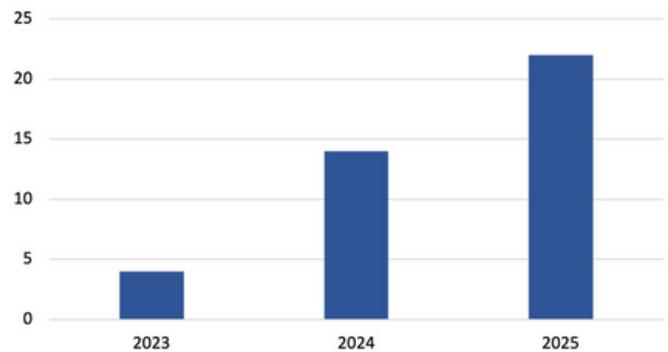
“Pertumbuhan LSBU membawa pengaruh langsung terhadap penerbitan SBU”

Namun demikian, tren mulai membaik pada tahun 2024 seiring dengan bertambahnya 10 LSBU baru, sehingga total menjadi 14 LSBU

secara nasional. Peningkatan ini memberikan dampak positif terhadap jumlah SBU yang diterbitkan, yang meningkat menjadi 302.139. Artinya, semakin bertambahnya LSBU memberikan perluasan akses layanan, mempercepat proses verifikasi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem sertifikasi yang baru.

Hingga pertengahan tahun 2025 (per 10 Juli), secara terakumulasi jumlah LSBU terus bertambah menjadi 22 LSBU. Hal ini beriringan dengan kenaikan jumlah SBU yang telah diterbitkan mencapai 318.166, menunjukkan bahwa pertumbuhan kelembagaan LSBU membawa pengaruh langsung terhadap dinamika sertifikasi badan usaha. Meski peningkatannya tidak setajam tahun 2021-2022, tren ini mengindikasikan pemulihan yang stabil dan berkelanjutan.

Tren Jumlah LSBU

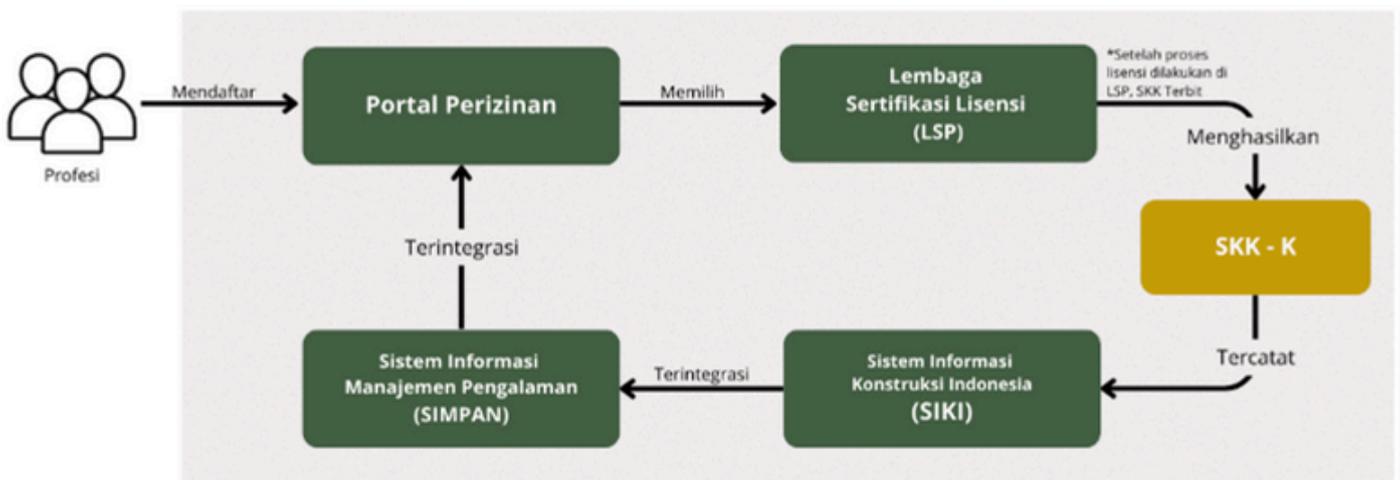


Sumber: Monev LPJK, Juli 2025

Keberhasilan sistem Sertifikasi Badan Usaha tidak hanya ditentukan oleh perubahan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan yang mampu menjalankan mandatnya secara konsisten, cepat, dan terstandar. Oleh karena itu, penguatan LSBU secara kelembagaan menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan pertumbuhan SBU yang sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.

Transformasi Sistem dan Tantangan yang Dihadapi

Perubahan besar dalam sistem sertifikasi tidak hanya menuntut penyesuaian teknis dan administratif, tetapi juga kesiapan dari seluruh ekosistem pelaku jasa konstruksi—baik itu tenaga kerja, badan usaha, asosiasi, maupun penyelenggara pelatihan. Dalam upaya mendukung implementasi transformasi digital dan meningkatkan efisiensi layanan, LPJK telah melakukan alih kewenangan proses sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Seiring dengan itu, sistem informasi milik LPJK dan LSP kini telah terintegrasi untuk mendukung proses sertifikasi secara menyeluruh mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pencatatan hasil sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSP yang dipilih.



Sumber: Tim IT Sekretariat LPJK, 2025

Integrasi ini memungkinkan pelaku profesi dan asosiasi untuk mengakses data sertifikasi mereka secara langsung, real-time, dan akurat melalui sistem informasi LPJK seperti SIKI, SIMPAN, maupun Portal Perizinan. Pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi ini terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen LPJK dalam upaya meningkatkan kualitas layanan digital serta mendorong pencapaian target kinerja yang lebih baik setiap tahunnya.

Penurunan angka sertifikasi di tahun-tahun awal transisi menjadi pelajaran penting bahwa regulasi perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, jumlah lembaga penyelenggara sertifikasi, serta pendampingan kepada stakeholder. Perjalanan sertifikasi SKK dan SBU dalam jasa konstruksi Indonesia mencerminkan dinamika sistemik yang kompleks. Meski mengalami penurunan pada masa transisi 2021–2022, tren pemulihan pada 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa sistem mulai berjalan stabil dengan LSP yang semakin banyak dan pelaku usaha yang makin adaptif terhadap regulasi baru.

CEK KEABSAHAN SBU & SKK SEKARANG!

Pastikan Sertifikat Badan
Usaha dan Sertifikat
Kompetensi Kerja Anda
terdaftar resmi di LPJK!

Cek via lpjk.pu.go.id
atau
Unduh aplikasi LPJK dengan scan QR code ini



Dari Sertifikasi ke Pembangunan: Peran Asesor yang Tak Tergantikan

Penulis:

**Patriks Christian Sipa Pasambe, S.Tr.T., Celine Oktavia Putri, S.T.,
Fioline Musdalifah, S.Ars.**

LPJK, Bidang Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK

Pembangunan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh desain teknis dan pembiayaan, tetapi juga oleh pelaku usaha jasa konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi. Proses sertifikasi badan usaha menjadi gerbang utama untuk memastikan bahwa setiap badan usaha yang terlibat benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari sisi legalitas, kemampuan teknis, maupun manajerial.

Kualitas dan keberhasilan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek-proyek berskala masif seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak dapat dilepaskan dari kompetensi para pelakunya, baik pada level individu Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) maupun entitas Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Di balik pembangunan nasional yang terus bergerak maju, terdapat fondasi penting yang sering luput dari perhatian: kualitas dan kelayakan badan usaha. Sertifikasi badan usaha menjadi instrumen utama dalam menjamin bahwa suatu perusahaan layak dan siap berkontribusi dalam sektor strategis, khususnya di bidang jasa konstruksi dan industri lainnya. Dalam ekosistem jasa konstruksi Indonesia, sertifikasi badan usaha

(SBU) bukan sekadar syarat administratif, tetapi merupakan instrumen utama dalam menjamin kredibilitas, kompetensi, dan kapabilitas badan usaha yang akan terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional. Sertifikasi badan usaha adalah tahap krusial dalam menjamin kualitas proyek konstruksi nasional.

Namun, proses ini tidak akan berjalan tanpa kehadiran sosok profesional yang bekerja dengan penuh integritas yaitu asesor badan usaha. Melalui evaluasi yang kredibel, asesor badan usaha memastikan hanya BUJK yang layak dan kompeten yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Sertifikasi ini tidak terwujud begitu saja, dibaliknya terdapat proses evaluasi, verifikasi, dan validasi yang sangat ketat.

Dan di pusat proses tersebut berdirilah Asesor Badan Usaha, aktor profesional yang memegang peran krusial namun sering kali tak terlihat. Asesor bukan hanya "penilai", tetapi pengawal mutu. Mereka bukan hanya bertugas memeriksa dokumen, tetapi turut berkontribusi dalam menjaga kualitas pembangunan nasional sejak dari hulu: proses seleksi dan verifikasi badan usaha.

Asesor adalah filter awal terhadap kualitas pelaku usaha. Dari sinilah proses pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan bermula. Keputusan asesor dalam evaluasi Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi berdampak nyata terhadap kualitas proyek di lapangan. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang tersertifikasi dengan valid dapat mengurangi risiko kegagalan konstruksi, keterlambatan proyek, hingga potensi pemborosan anggaran negara.

Sertifikasi yang valid menjamin bahwa badan usaha memiliki:

1. Tenaga ahli (PJBU/PJTBU/PJSKBU) yang berkompeten
2. Peralatan yang memadai
3. Kemampuan keuangan yang memadai
4. Pengalaman kerja yang sesuai
5. Sistem manajemen yang terdokumentasi, termasuk penerapan SMAP

Kualitas evaluasi yang dilakukan akan sangat memengaruhi kualitas badan usaha yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, proyek jalan, jembatan, bendungan, hingga perumahan rakyat berawal dari hasil kerja seorang asesor. Asesor Badan Usaha adalah garda depan mutu dalam dunia jasa konstruksi.

Mereka bukan sekadar bagian dari proses sertifikasi, tetapi bagian dari rangkaian pembangunan nasional yang lebih besar. Dari sertifikasi hingga pembangunan, peran asesor badan usaha adalah tindakan preventif untuk meminimalkan risiko kegagalan proyek, memastikan mutu hasil kerja, dan membantu Indonesia membangun infrastruktur yang kokoh, aman, efisien, dan berkelanjutan.

Di era inovasi konstruksi saat ini, peran asesor badan usaha bukan hanya tak tergantikan, tetapi semakin relevan dan strategis untuk masa depan pembangunan nasional kita. Dalam setiap gedung yang berdiri kokoh dan setiap jalan yang

membentang lurus, ada jejak tak terlihat dari kerja keras seorang asesor.

Profesionalisme seorang asesor tidak hanya diukur dari pengalaman teknisnya, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap standar kompetensi dan kode etik yang baku dan mengikat. Integritas dan objektivitas asesor dibingkai oleh kode etik profesi yang ketat. Prinsip-prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi meliputi dedikasi, kejujuran, integritas, objektivitas, kerahasiaan informasi, serta kewajiban untuk menghindari segala bentuk konflik kepentingan.

Proses evaluasi yang dilakukan oleh seorang asesor bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari rantai nilai yang berdampak langsung pada kualitas fisik infrastruktur yang dibangun di seluruh negeri. Keputusan yang diambil saat verifikasi, validasi, dan evaluasi dokumen badan usaha memiliki konsekuensi nyata terhadap mutu, keamanan, dan keberhasilan proyek konstruksi.

Asesor dan Tantangan Kompleks di Era Perubahan

1. Memperbarui pengetahuan teknologi terkini agar relevan dengan kebutuhan industri.
2. Menjaga integritas dan objektivitas dalam asesmen meskipun tuntutan percepatan proyek semakin tinggi.
3. Menghadapi keterbatasan akses pelatihan teknologi baru di beberapa daerah.
4. Mendorong LSBU dan sistem sertifikasi untuk lebih adaptif dan proaktif mengikuti perkembangan industri.

Karena itu, peningkatan kapasitas asesor menjadi kebutuhan mendesak agar mereka mampu menjaga kualitas asesmen sambil memahami perkembangan teknologi konstruksi terbaru.

Berdasarkan data SIKI LPJK per tanggal 29 Juli 2025, tercatat sebanyak 328 Asesor Badan Usaha yang saat ini masih aktif melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses sertifikasi badan usaha di seluruh Indonesia. Jumlah ini mencerminkan kapasitas sumber daya profesional yang mendukung pelaksanaan penjaminan mutu terhadap badan usaha jasa konstruksi, khususnya dalam tahapan verifikasi, validasi, dan asesmen kelayakan.

Berdasarkan data SIKI LPJK per tanggal 29 Juli 2025, tercatat sebanyak 328 Asesor Badan Usaha yang saat ini masih aktif

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam proses sertifikasi badan usaha di seluruh Indonesia. Jumlah ini mencerminkan kapasitas sumber daya profesional yang mendukung pelaksanaan penjaminan mutu terhadap badan usaha jasa konstruksi, khususnya dalam tahapan verifikasi, validasi, dan asesmen kelayakan.

Hingga periode yang sama, tercatat sebanyak 322.017 Sertifikat Badan Usaha (SBU) KBLI 2020 yang masih berlaku dan aktif digunakan oleh pelaku jasa konstruksi, serta sebanyak 22 Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terlisensi dan melaksanakan layanan sertifikasi badan usaha. Keterpaduan antara jumlah asesor yang kompeten, LSBU yang aktif, dan volume SBU yang dikelola menunjukkan pentingnya kesinambungan peran asesor dalam menjaga kualitas, integritas sistem sertifikasi, dan mendukung percepatan pembangunan nasional.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan beban kerja dan cakupan wilayah sertifikasi yang terus meningkat, jumlah asesor badan usaha yang tersedia saat ini masih belum mencukupi secara proporsional. Ketimpangan ini berpotensi menghambat efisiensi proses sertifikasi dan kualitas layanan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa rekrutmen dan pelatihan asesor badan usaha baru secara berkelanjutan, guna memastikan tersedianya sumber daya profesional yang memadai untuk mendukung sistem sertifikasi badan usaha dan pembangunan nasional.



Sumber: Dokumentasi LPJK, 2024

Tantangan Independensi dan Pembiayaan Penilai Ahli Dalam Kasus Kegagalan Bangunan

Penulis:

Hendro Widodo, S.T., M.T, Gamaliel Eqno D., S.T., dan Nurfathonah Wulansari, S.T
 LPJK, Bidang Pelatihan, Uji Kompetensi, dan Penetapan Penilai Ahli

Kegagalan Bangunan dan Penugasan Penilai Ahli

Dalam hal penyelenggaraan konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana, diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Secara definisi, kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Jika terjadi pelaporan kejadian kegagalan bangunan oleh pengguna jasa, pemilik bangunan, penanggung jawab atau pengelola bangunan, atau pihak lain kepada LPJK, maka LPJK harus menetapkan Penilai Ahli dalam kurun waktu maksimal 30 hari kerja untuk melakukan penilaian kegagalan bangunan.

Pertanyaannya, bagaimana pembiayaan untuk penugasan Penilai Ahli tersebut? Mengingat Penilai Ahli wajib bekerja secara profesional, tidak memihak, dan hasil penilaian kegagalan bangunan harus objektif.

Potensi Konflik Kepentingan dalam Regulasi Pembiayaan

Menurut peraturan perundang-undangan, biaya penugasan Penilai Ahli dibebankan kepada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan berdasarkan

penetapan Penilai Ahli. Namun, dalam hal pihak yang bertanggung jawab belum ditetapkan, maka biaya Penilai Ahli dibebankan terlebih dahulu kepada pengguna jasa atau pemilik/penanggung jawab bangunan. Ketentuan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja antara Penilai Ahli dan Pengguna Jasa/Penanggung Jawab Bangunan. Ketentuan peraturan tersebut secara logika dapat membuat keputusan penilai ahli sulit untuk independen atau objektif, karena pembiayaan dibebankan terlebih dahulu kepada pengguna jasa atau penanggung jawab bangunan. Meskipun demikian, objektivitas dan independensi harus tetap dijaga. Penilai Ahli wajib menerapkan kode etik dan kode perilaku. Selain itu, ada sanksi bagi Penilai Ahli apabila terbukti melanggar, seperti tidak memenuhi kewajiban secara profesional, menjadi bagian dari salah satu pihak, atau melanggar ketentuan kode etik dan kode perilaku selama menjalankan tugasnya.

Biaya Penugasan Penilaian Kegagalan Bangunan

Biaya Penugasan Penilai Ahli dalam melaksanakan penilaian kegagalan bangunan meliputi:

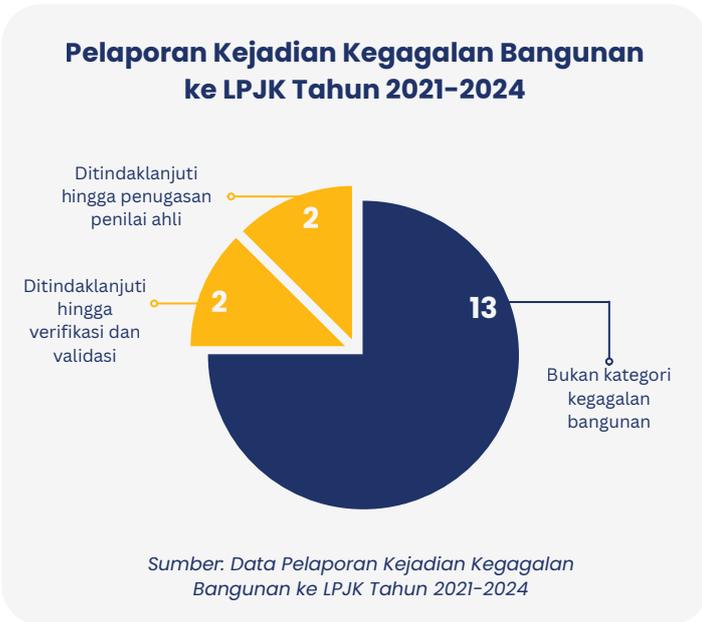
- honorarium Penilai Ahli;
- biaya perjalanan dan biaya akomodasi yang dikeluarkan Penilai Ahli;
- biaya tenaga ahli dan pendukung lainnya yang diperlukan dalam penilaian ahli;
- biaya pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan dalam penilaian ahli; dan
- biaya administrasi yang meliputi pengadaan dokumen, sewa peralatan, dan pengadaan alat pelindung diri.

Pembiayaan tersebut dibebankan terlebih dahulu kepada pengguna jasa dan/atau pemilik/penganggung jawab bangunan sebelum pihak yang bertanggung jawab ditetapkan, inilah yang kemudian berpotensi memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Kondisi ini dapat menghasilkan penilaian yang tidak objektif atau berpihak kepada salah satu pihak, baik pengguna atau penyedia jasa.

Tugas lain LPJK yang terkait Penilai Ahli, kegagalan bangunan, dan penilaian kegagalan bangunan meliputi:

- pelatihan dan uji kompetensi penilai ahli.
- pencatatan penilai ahli.
- penetapan penilai ahli yang terdaftar/tercatat untuk penugasan dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
- pemenuhan permintaan menteri untuk penugasan Penilai Ahli tanpa didahului adanya pelaporan kejadian kegagalan bangunan kepada LPJK.
- penerimaan laporan kejadian kegagalan bangunan.
- pembinaan penilai ahli yang meliputi pemberdayaan dan pengawasan.

Tugas-tugas tersebut memiliki konsekuensi pembiayaan yang harus ditanggung oleh LPJK. Sebagai gambaran atas ketersediaan anggaran di LPJK, pada tahun 2025 ini LPJK tidak mengadakan pencatatan, pelatihan, dan uji kompetensi Penilai Ahli yang baru. Sementara untuk pelaksanaan pembinaan Penilai Ahli dibantu dengan kolaborasi antar instansi.



Kendala Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran LPJK perlu diulas karena erat kaitannya dengan pembiayaan penugasan Penilai Ahli dalam penilaian kegagalan bangunan. Di artikel ini disajikan data singkat jumlah pelaporan kejadian kegagalan bangunan yang diterima LPJK. Laporan atas kejadian kegagalan bangunan memerlukan langkah awal berupa verifikasi dan validasi yang juga membutuhkan pendanaan. Verifikasi dan validasi ini penting dilakukan di lapangan sebelum penetapan Penilai Ahli untuk melakukan penilaian kegagalan bangunan.

Berdasarkan data pelaporan yang masuk ke LPJK dari tahun 2022 hingga 2024, LPJK menerima 17 laporan terkait kegagalan bangunan. Setiap laporan punya tindak lanjut yang berbeda. Sebagian laporan ternyata bukan termasuk kategori kegagalan bangunan, sedangkan empat kasus yang diindikasikan sebagai kegagalan bangunan diproses lebih lanjut. Untuk empat kasus tersebut, LPJK menugaskan tim verifikasi dan validasi ke lapangan. Hasilnya, dua dari empat laporan ditetapkan sebagai kegagalan bangunan dan dilanjutkan ke tahap penilaian oleh Penilai Ahli.

Penugasan tim verifikasi dan validasi ke lapangan tentunya memerlukan dana. Jika semua kasus yang dilaporkan ditindaklanjuti dengan penugasan tim verifikasi dan validasi, maka akan timbul biaya yang besar. Sayangnya, LPJK secara finansial tidak mampu menanggung biaya tersebut. Selama ini LPJK menggunakan dari APBN untuk membiayai penugasan tim, tetapi keterbatasan dana APBN saat ini menghambat LPJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait penilaian kegagalan bangunan. Seharusnya, dana ini disediakan oleh LPJK, sebab verifikasi dan validasi merupakan tugas LPJK sebelum penetapan Penilai Ahli untuk menilai kegagalan bangunan. Namun, pada praktiknya, pihak pelapor atau pengguna jasa justru membiayai proses tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran.

Urgensi Perubahan Menjamin Independensi

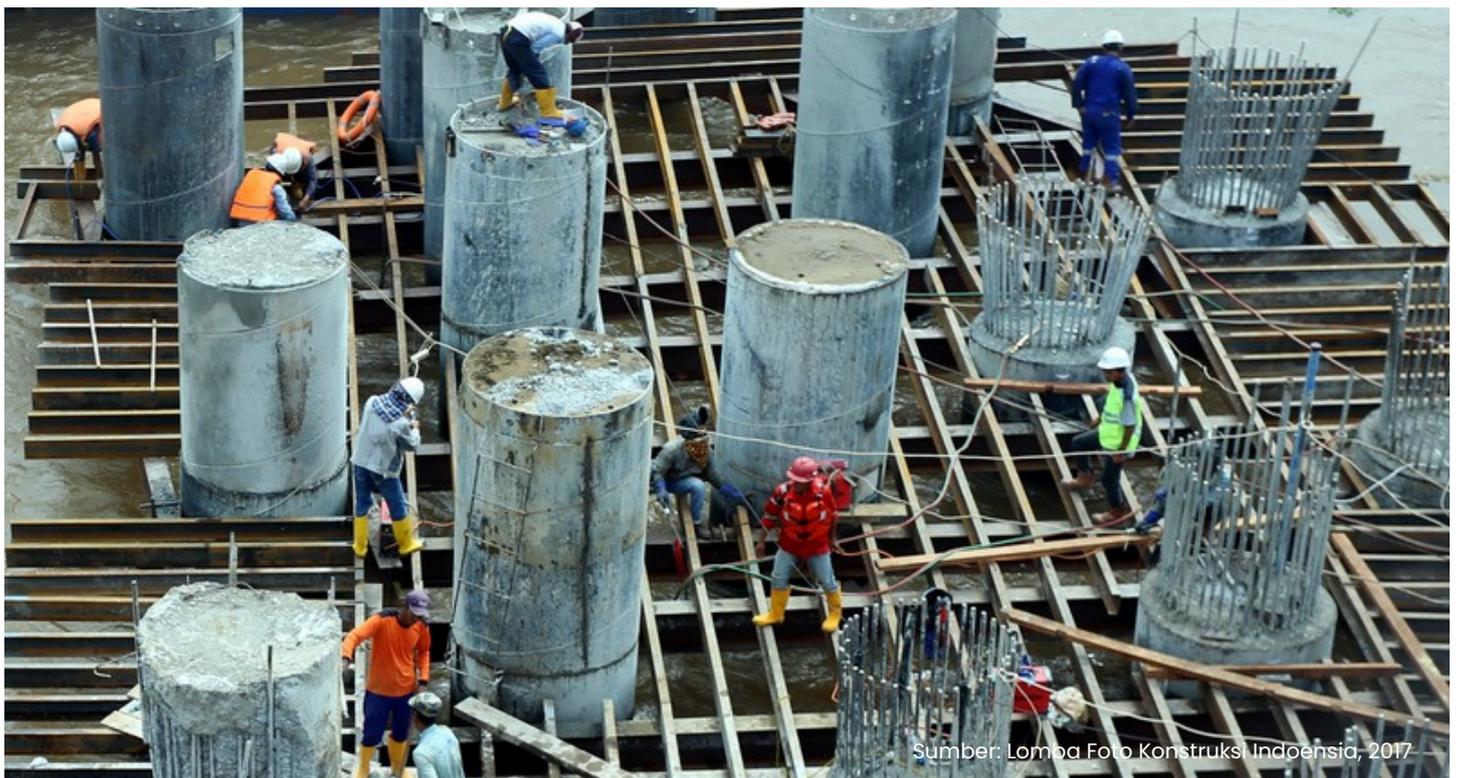
Selain pembiayaan verifikasi dan validasi, pembiayaan penugasan penilaian kegagalan bangunan oleh Penilai Ahli seharusnya juga ditanggung terlebih dahulu oleh LPJK. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan objektivitas hasil penilaian. Dengan pembiayaan dari LPJK, Penilai Ahli dapat memberikan hasil yang tidak memihak kepada pengguna maupun

penyedia jasa, mengingat keduanya berpotensi ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.

Rekomendasi Penguatan Regulasi dan Pendanaan

Untuk memaksimalkan tugas dan fungsi LPJK terkait Penilai Ahli dan penilaian kegagalan bangunan, serta meminimalkan konflik kepentingan, diusulkan:

- Penyediaan Anggaran Rutin: Menyediakan pendanaan rutin untuk verifikasi dan validasi laporan kegagalan bangunan dan pembinaan Penilai Ahli secara berkelanjutan.
- Optimalisasi Dana Tanggap Darurat: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat menyusun SOP pemanfaatan dana tanggap darurat bencana atau kegiatan mendesak dari Kementerian PU untuk pembiayaan penilaian kegagalan bangunan.
- Kolaborasi Unit Organisasi Kementerian PU: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat berkolaborasi dengan unit organisasi di Kementerian PU agar Penilai Ahli dapat diberdayakan dalam penanganan kegagalan bangunan akibat bencana atau keadaan darurat.
- Penyusunan Aturan Remunerasi: Menetapkan Keputusan Menteri PU tentang standar remunerasi Penilai Ahli sebagai acuan anggaran Penilaian Kegagalan Bangunan.
- Revisi Regulasi Pembiayaan: Melakukan perbaikan regulasi agar seluruh pembiayaan penilaian kegagalan bangunan ditanggung pemerintah demi menjamin independensi dan objektivitas Penilai Ahli.
- Pemulihan Peran Penilai Ahli: Melakukan perbaikan regulasi dengan mengembalikan cakupan peran Penilai Ahli seperti sebelum diterbitkannya UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi.



Sumber: Lomba Foto Konstruksi Indoensia, 2017



Dukung Pelaksanaan MRA Bidang Desain Interior, LPJK Tindaklanjuti Kerjasama Dengan Filipina

Penulis:

Nofa Fatkhur Rakhman, S.A.P, Inna Normaningsih, S.Tr, dan Sarah Muktafikah, S.Si LPJK, Bidang IV, Akreditasi Asosiasi dan Penyetaraan TKKA

Dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing sektor jasa konstruksi nasional di kancah global, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) telah menandai babak baru dalam kerja sama internasional. Sebuah langkah strategis terwujud melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam bentuk *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) khusus untuk layanan desain interior. Kesepakatan penting ini terjalin antara LPJK dan *Professional Regulation Commission* (PRC) Republik Filipina yang telah ditetapkan pada Senin, 20 November 2023, di kantor LPJK, Jakarta.

Penandatanganan MRA ini bukanlah sekadar formalitas. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan kolaboratif diantara LPJK, Kementerian Pekerjaan Umum, Himpunan Desain Interior Indonesia (HDII) dan PRC Republik Filipina. Dimulai dari inisiasi awal untuk meningkatkan hubungan antar negara, serta mendorong pertukaran tenaga kerja konstruksi ahli yang kompeten.

Sejak dilakukannya penandatanganan MRA yang merupakan komitmen nyata LPJK untuk mendukung kerja sama tenaga profesional desain interior. LPJK melalui dorongan Bapak Ketua, Taufik Widjoyono, dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kompetensi secara signifikan, serta mempersiapkan desainer interior Indonesia dan Filipina untuk merajai tantangan dan peluang di era globalisasi.

Kerjasama strategis antara LPJK dan PRC Filipina ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan profesional dan industri desain interior, bertumpu pada dua pilar utama yang saling menguatkan yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Tinggi dan Kemitraan Proyek & Transfer Pengetahuan. MRA ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan mendalam tentang pengembangan SDM konstruksi dengan terwujud melalui pertukaran pengajar dan profesional hal tersebut dapat mendorong transfer pengetahuan dan teknologi. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian dan pengembangan kolaboratif melalui proyek-proyek inovatif dalam material, teknologi, dan pendekatan desain berkelanjutan serta kedua negara dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam aspek desain interior untuk mencapai hasil proyek yang lebih optimal dan inovatif, menciptakan sinergi yang menguntungkan.



Sumber: Instagram Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU, 2023

Perjanjian ini adalah jembatan penting yang memfasilitasi mobilitas desainer interior, memungkinkan para profesional dari kedua negara untuk lebih mudah mendapatkan pengakuan kualifikasi dan berpartisipasi dalam proyek di wilayah masing-masing, menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih terintegrasi dan dinamis. LPJK juga menegaskan komitmennya untuk membuka peluang pengembangan industri desain interior bagi seluruh pemangku kepentingan, mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Chairperson PRC, Charito A. Zamora, menyambut baik inisiatif ini, menyatakan antusiasmenya untuk mengintegrasikan teknologi dan inovasi ke dalam jasa konstruksi desain interior, menandakan evolusi kerja sama yang melampaui keahlian tradisional. Kehadiran Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) dalam kerangka kerja sama ini memastikan aspirasi dan kebutuhan para desainer interior Indonesia terakomodasi, memberikan mereka kesempatan lebih luas untuk bersaing efektif di tingkat regional.



Sumber: Dokumentasi LPJK, 2023

Kerja sama antara LPJK dan PRC Filipina ini memiliki prospek jangka panjang yang sangat menjanjikan, tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi pengembangan industri desain interior di kawasan Asia Tenggara.

Beberapa prospek utama dari kerjasama LPJK dan PRC Filipina bagi pengembangan industri desain interior ini meliputi:

- **Peningkatan Kualitas dan Standar Global:** Pertukaran praktik terbaik dan standar pendidikan akan meningkatkan kualitas desain interior secara signifikan, mendorong desainer untuk melampaui standar internasional.
- **Pusat Keunggulan Desain Interior Regional:** Kolaborasi ini berpotensi menjadikan Indonesia dan Filipina sebagai pusat keunggulan desain interior di Asia Tenggara, menjadi rujukan bagi negara lain.
- **Peluang Ekonomi yang Meluas:** Mobilitas profesional dan kemitraan proyek akan membuka pintu bagi peluang ekonomi baru, menciptakan aliran investasi dan pekerjaan yang saling menguntungkan serta menarik investor asing.
- **Inovasi Berkelanjutan:** Fokus pada penelitian dan inovasi akan mendorong pengembangan solusi desain yang lebih berkelanjutan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
- **Penguatan Jaringan Profesional:** Kerja sama ini akan memperkuat jaringan profesional antara desainer, akademisi, dan lembaga terkait di kedua negara, memfasilitasi kolaborasi di masa depan.
- **Pengakuan Internasional yang Lebih Besar:** Dengan peningkatan kualitas dan standar, profesional desain interior dari Indonesia dan Filipina akan mendapatkan pengakuan internasional yang lebih besar, membuka peluang proyek berskala global.

Upaya kolaboratif ini semakin dipermudah dengan proses pengembangan situs web khusus oleh Indonesia melalui LPJK dan HDII bersama PRC Filipina dalam memproses mekanisme MRA. Keseluruhan kerja sama ini adalah manifestasi dari visi bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi industri desain interior di Asia Tenggara, didasari prinsip saling pengakuan, pertukaran pengetahuan, dan pembangunan kapasitas bersama. Ini adalah langkah maju yang signifikan menuju profesionalisme yang lebih tinggi, inovasi yang lebih besar, dan daya saing yang lebih kuat di panggung global.

Dukung Tertib Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKKA), LPJK bersama Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan TKKA di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Penulis:

Nofa Fatkhur Rakhman, S.A.P, Inna Normaningsih, S.Tr, dan Sarah Muktafikah, S.Si LPJK, Bidang Akreditasi Asosiasi dan Penyetaraan TKKA

Gelombang globalisasi yang tak terhindarkan telah membawa dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk industri konstruksi. Peningkatan investasi, baik domestik maupun asing, memicu lonjakan proyek konstruksi berskala besar dan kompleks, yang mendorong masuknya Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKKA) ke berbagai negara termasuk Indonesia. Fenomena ini menuntut adanya regulasi dan pengawasan ketat untuk memastikan kehadiran TKKA memberikan kontribusi positif.

Peran Strategis TKKA dalam Pembangunan Nasional

TKKA memiliki peran strategis dalam pembangunan konstruksi di Indonesia. TKKA kerap mengisi celah keahlian dan spesialisasi yang belum sepenuhnya tersedia di pasar lokal, khususnya untuk proyek besar yang membutuhkan teknologi konstruksi terkini atau manajemen proyek berskala internasional. Kehadiran TKKA membantu memastikan proyek berjalan tepat waktu dan memenuhi standar kualitas tertinggi. Lebih dari itu, mereka diharapkan menjadi katalisator transfer pengetahuan dan teknologi. Melalui alih ilmu, keterampilan, dan adopsi inovasi, tenaga kerja domestik dapat mengasah kemampuan dan meningkatkan kualitas. Tak dapat dipungkiri, peran strategis TKKA turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan menarik investasi lebih lanjut, membuka gerbang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih masif di Indonesia.

Landasan Regulasi yang Kokoh

Demi menjaga kualitas dan profesionalisme sektor konstruksi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan fondasi regulasi yang kokoh. Undang-Undang No 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 8 Tahun 2022 menjadi payung hukum utama yang secara jelas mengatur kualifikasi dan klasifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Inti dari regulasi tersebut adalah kewajiban bagi setiap tenaga kerja konstruksi untuk memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K).

Sejalan dengan peraturan tersebut, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) turut berperan aktif dalam memastikan standar kualitas, termasuk untuk Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKKA) melalui Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 02.1/SE/LPJK/2022. Aturan ini memastikan bahwa standar kualitas kerja dari tenaga kerja asing seragam dan sesuai dengan standar nasional.

Upaya Peningkatan Tertib Penggunaan TKKA di Lingkungan Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) sebagai instansi yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan infrastruktur, terus menegaskan komitmennya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang tertib dan akuntabel, khususnya terkait penggunaan tenaga kerja konstruksi asing. Langkah-langkah strategis telah ditempuh untuk memastikan kepatuhan dan kualitas dalam setiap proyek infrastruktur. Salah satunya adalah penerbitan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Nomor 76/SE/2024 tentang Pedoman Penggunaan TKKA di Lingkungan Kementerian PUPR. Dokumen ini menjadi panduan komprehensif yang mengatur secara detail prosedur dan persyaratan bagi TKKA, demi memastikan setiap TKKA memenuhi standar kompetensi dan regulasi yang berlaku.

Kementerian PU juga secara progresif mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi dua sistem informasi utama yaitu Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ) dan Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK). Keduanya kini menjadi instrumen yang dibutuhkan dalam pemantauan TKKA, serta memungkinkan pencatatan data yang lebih akurat.

Rencana Integrasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Selain itu Kementerian Pekerjaan Umum juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menciptakan sistem informasi ketenagakerjaan menjadi platform vital yang menghubungkan data dari berbagai informasi. Melalui integrasi

daring ini, seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses dan berbagi informasi terkait TKA secara real-time sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 38. Integrasi ini dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia, dengan menghubungkan data secara elektronik antara berbagai instansi pemerintah terkait.



Integrasi ini mencakup beberapa kerja sama, di antaranya:

- **Kerja Sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemendikham):** Data Pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang telah diterbitkan Kemnaker berfungsi sebagai rekomendasi penting bagi TKKA untuk memperoleh visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja. Hal ini memastikan sinkronisasi data antara kebutuhan tenaga kerja dan status keimigrasian.
- **Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS):** Integrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadi krusial. Melalui kerja sama ini, Kemnaker dapat mengakses data penting seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), data Pemberi Kerja TKKA, dan data Pengesahan RPTKA yang telah diterbitkan. Hal ini menciptakan alur perizinan yang lebih efisien, menghindari duplikasi data, dan mempercepat proses bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan TKKA.

Integrasi data ini tidak hanya mempermudah proses perizinan dan pemantauan, tetapi juga memastikan setiap TKKA yang masuk dan bekerja di Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dan mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan demikian, data terintegrasi dapat menciptakan tata kelola TKKA yang akuntabel, meminimalkan potensi penyalahgunaan, dan pada akhirnya, mengoptimalkan kontribusi TKKA bagi pembangunan nasional tanpa mengabaikan kepentingan tenaga kerja domestik.

Selain itu, penyedia jasa yang mempekerjakan TKKA juga diwajibkan memiliki program alih teknologi dan pengetahuan kepada tenaga kerja lokal. Pemantauan ketat dilakukan untuk memastikan program ini berjalan efektif, melalui laporan berkala dan evaluasi langsung di lapangan. Tujuannya agar kehadiran TKKA benar-benar menciptakan "*multiplier effect*" bagi peningkatan kompetensi SDM konstruksi nasional.

Kolaborasi dalam Memastikan Kepatuhan Penggunaan TKKA

Keberhasilan dalam kegiatan proyek konstruksi yang melibatkan Tenaga Kerja Konstruksi Asing sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan kontrak. Salah satu elemen yang harus dilibatkan dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK memiliki tanggung jawab langsung terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kontrak, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja penyedia jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, peran dan tugas PPK semakin diperkuat dalam rangka memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan internasional juga merupakan salah satu tugas PPK. Langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan regulasi didukung dengan sistem informasi terintegrasi, yaitu SIPBJ dan SIKOMPAK.

Proses kepatuhan penggunaan TKKA tidak luput dari proses pemantauan dan evaluasi. Peran pengawasan dilakukan secara kolaboratif antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan SK DJBK 75/2024.

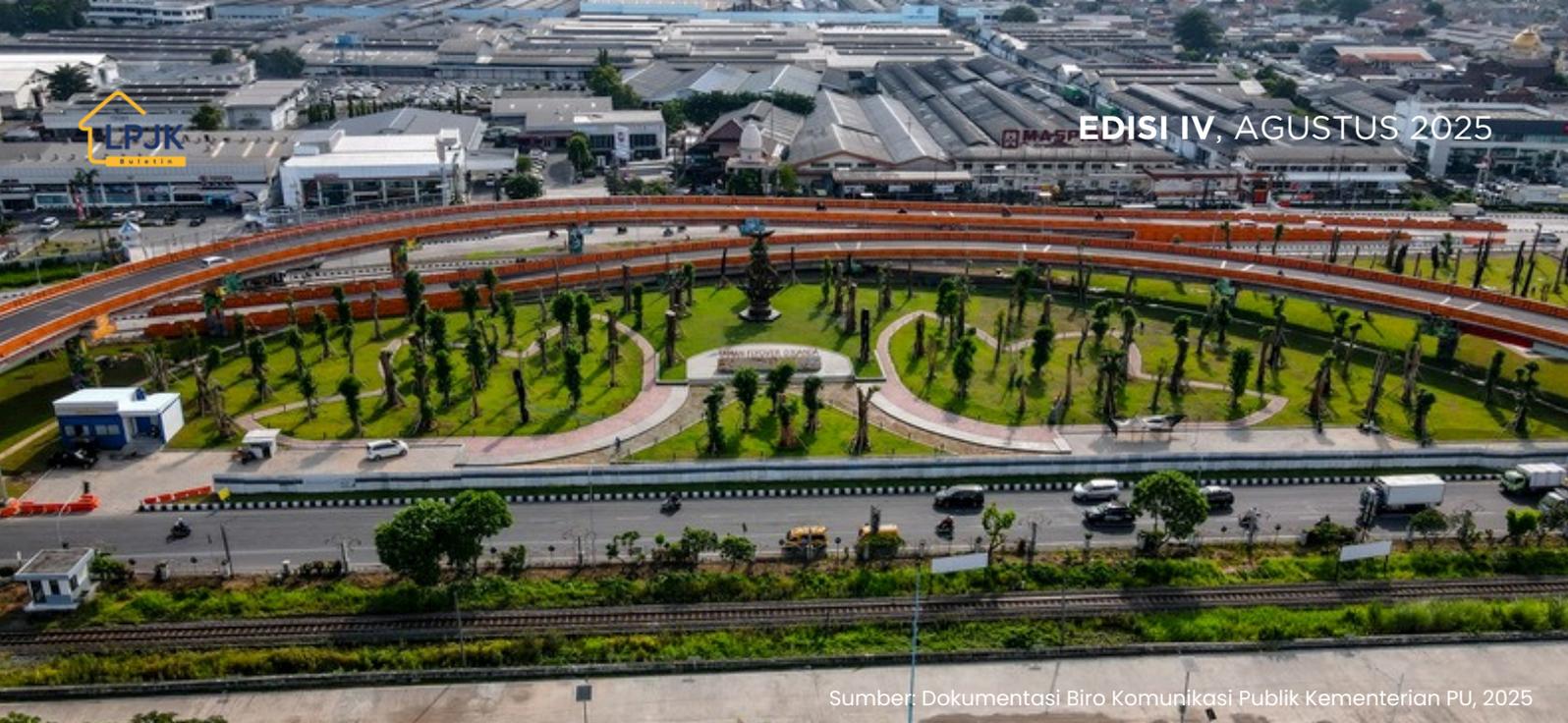
Tim pemantau dan evaluator bertugas untuk memberikan pendampingan kepada PPK dan melakukan evaluasi ke penyedia jasa. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala UPT, Menteri PU dan Menaker, juga menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi ke penyedia jasa.

Dengan sinergi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi Asing di Indonesia dapat terus berlangsung secara tertib, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan sektor konstruksi nasional, sekaligus memperkuat kompetensi SDM lokal.

Kesimpulan

Upaya Kementerian PU berkolaborasi dengan Kementerian dan lembaga terkait lainnya dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan TKKA adalah langkah krusial untuk memastikan tertib administrasi dan kualitas proyek konstruksi di Indonesia. Landasan regulasi yang kuat, integrasi sistem informasi yang canggih, serta komitmen terhadap transfer pengetahuan dan teknologi, menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola TKKA yang akuntabel. Dengan demikian, kehadiran TKKA diharapkan dapat terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional sambil tetap mengedepankan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi domestik.





Sumber: Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PU, 2025

Akreditasi Asosiasi: Membangun Kredibilitas di Sektor Jasa Konstruksi

Penulis:

Rm Dani Moeloek Arnansyah S.E, Donny Judha Hasiholan Sibuea S.E,
dan Sarah Muktafikah, S.Si
LPJK, Bidang Akreditasi Asosiasi dan Penyetaraan TKKA

Di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks dan terintegrasi, asosiasi profesional dan industri telah menjelma menjadi jantung vital bagi pertumbuhan, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Lebih dari sekadar perkumpulan, mereka adalah ekosistem dinamis tempat para ahli berbagi pengetahuan, mengembangkan standar praktik terbaik, mendorong etika profesi, serta memfasilitasi jaringan yang tak ternilai. Hadirnya akreditasi asosiasi menjadi krusial karena menunjukkan bahwa organisasi tersebut berkomitmen pada kualitas dan beroperasi dengan standar tertinggi. Pentingnya akreditasi ini semakin ditekankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang menilai bahwa akreditasi bagi asosiasi yang terlibat pada jasa konstruksi diperlukan sebagai standar dan penentu kelayakan jasa konstruksi yang efektif dan efisien.

Landasan Hukum dan Cakupan Akreditasi

Pentingnya akreditasi asosiasi jasa konstruksi semakin ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Menurut peraturan tersebut Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan sebuah asosiasi. Melalui proses inilah, sebuah asosiasi dapat mendapatkan status akreditasi yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar kualitas, tata kelola, dan operasional yang telah ditetapkan. Akreditasi dapat diikuti oleh Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi.

Penyelenggaraan akreditasi asosiasi jasa konstruksi, diemban oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang bertindak sebagai otoritas akreditasi yang memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi bidang guna mengakomodasi dinamika operasional asosiasi dan menjaga efisiensi proses.

Proses Menuju Akreditasi: Sebuah Perjalanan Terstruktur

Memperoleh akreditasi bagi sebuah asosiasi merupakan sebuah perjalanan terstruktur yang dirancang untuk memastikan kualitas dan kredibilitas organisasi. Proses ini menuntut persiapan matang dan kepatuhan terhadap serangkaian tahapan penting:

- 1. Pengajuan Permohonan:** Langkah awal yang krusial adalah pengajuan permohonan resmi kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Permohonan ini berisi dokumen lengkap yang memuat informasi detail tentang asosiasi, termasuk pemenuhan semua persyaratan wajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Verifikasi dan Validasi:** Setelah permohonan diajukan, tim akreditasi LPJK akan melanjutkan ke tahapan verifikasi dan validasi. Proses ini melibatkan tinjauan data/informasi menyeluruh terhadap asosiasi jasa konstruksi. Evaluasi komprehensif ini mencakup seluruh aspek yang dipersyaratkan, memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam dokumen permohonan selaras dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Tim akan memeriksa operasional dari kesesuaian data/informasi yang disampaikan, untuk memastikan asosiasi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
- 3. Penilaian dan Penetapan:** Tahapan terakhir adalah penilaian dan penetapan status akreditasi. Asosiasi yang berhasil melewati proses verifikasi dan validasi akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jika asosiasi tersebut berhasil memenuhi nilai ambang batas minimal 2.75, LPJK akan mengeluarkan sertifikat akreditasi. Sertifikat ini secara resmi menunjukkan bahwa asosiasi jasa konstruksi tersebut telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, menegaskan kredibilitas dan komitmennya terhadap praktik terbaik.

Proses verifikasi dan validasi Akreditasi Asosiasi oleh Tim Akreditasi LPJK



Sumber: Dokumentasi LPJK, 2025

Persyaratan Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi

Dalam memperoleh akreditasi, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, mencakup aspek administratif, kelembagaan, operasional, hingga komitmen etika. Berikut adalah rincian persyaratan tersebut:

Pertama, setiap permohonan harus diawali dengan surat permohonan akreditasi yang resmi. Selanjutnya, asosiasi wajib melampirkan data mengenai jumlah dan sebaran anggota, serta informasi terkait jumlah cabang yang dimiliki di berbagai daerah. Hal ini penting untuk menunjukkan jangkauan dan representasi asosiasi.

Aspek pemberdayaan anggota juga menjadi krusial. Untuk Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi terkait Rantai Pasok, perlu dibuktikan adanya program pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggotanya. Sementara itu, asosiasi profesi diwajibkan menyertakan bukti pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi para anggotanya.

Kemudian, tata kelola yang baik tercermin dari proses pemilihan pengurus secara demokratis, yang harus dibuktikan melalui pelaksanaan musyawarah nasional atau kongres sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) asosiasi. Selain itu, susunan pengurus baik di tingkat pusat maupun daerah juga harus sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku.

Dari sisi infrastruktur dan dukungan operasional, asosiasi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Ini meliputi kepemilikan bangunan gedung kantor, perlengkapan kantor yang lengkap, ketersediaan sumber daya manusia karyawan yang kompeten, serta memiliki website dan pangkalan data sistem informasi yang berfungsi. Asosiasi juga harus menunjukkan pelaksanaan kewajiban sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan kinerja tahunan secara transparan. Terakhir, sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan kebenaran data, pemohon wajib melampirkan pakta integritas dan surat pernyataan kebenaran isi dokumen yang diajukan.

Mekanisme Akreditasi Periodik oleh LPJK

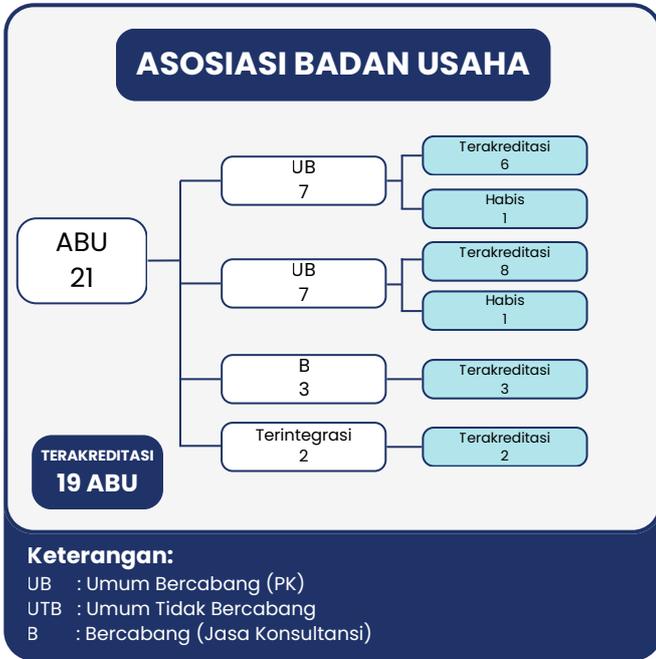
LPJK mengimplementasikan siklus akreditasi periodik. Penetapan akreditasi diselenggarakan setiap empat bulan dalam satu tahun atau tiga batch dalam satu tahun, yang dipecah menjadi beberapa periode pendaftaran dan verifikasi. Siklus ini dibagi untuk memungkinkan peserta yang mengajukan permohonan dapat menjalani evaluasi secara sistematis. Pendekatan periodik ini menjadi fondasi utama bagi LPJK dalam memastikan kompetensi dan kualitas badan usaha jasa konstruksi di Indonesia senantiasa relevan dan teruji.

**Akreditasi Asosiasi Jasa
Konstruksi oleh LPJK
diselenggarakan secara periodik:**

3 batch
dalam waktu
1 tahun

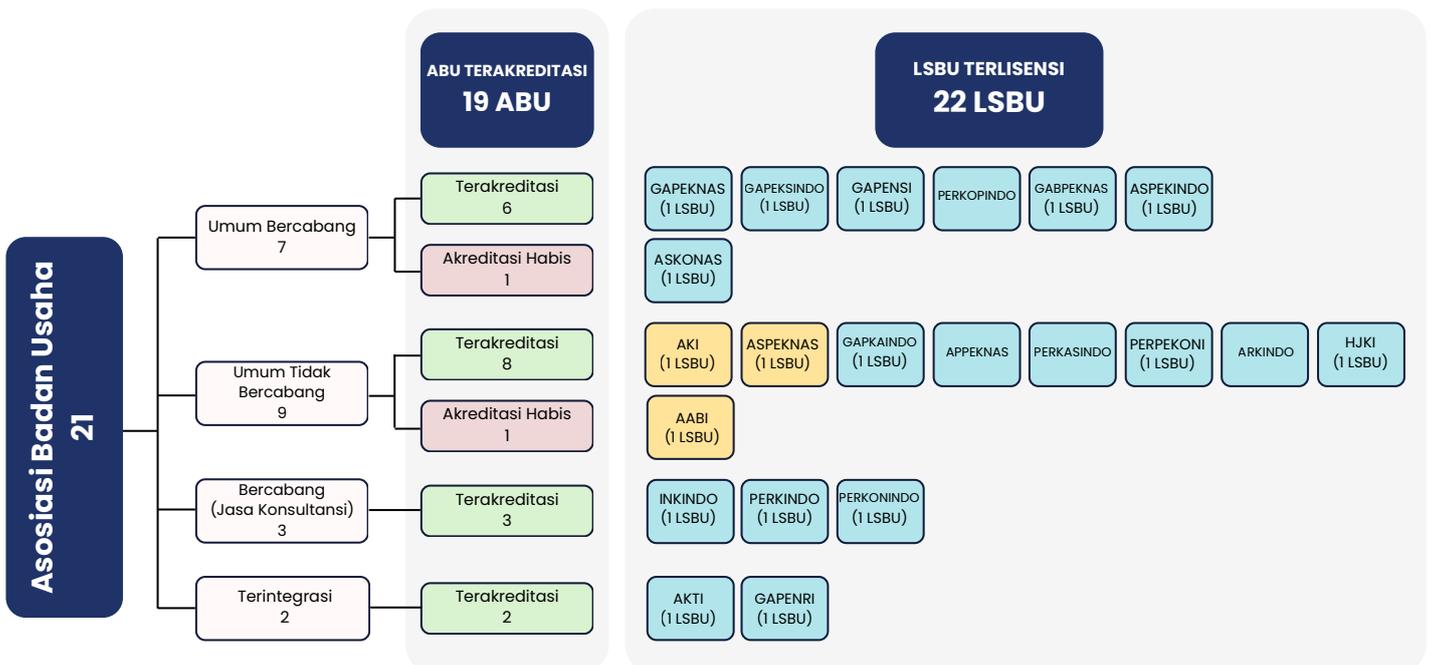
Capaian Akreditasi Asosiasi di Tahun 2025: Studi Kasus Batch 13

Memasuki Periode 2 atau *batch* 14 pada bulan Agustus ini, proses akreditasi jasa konstruksi di tahun 2025 masih berlangsung. Berikut ini adalah gambaran data asosiasi terkini.



Sumber: Monev LPJK, Juli 2025

Gambar diatas merupakan data capaian akreditasi di *batch* sebelumnya yang menjadi bukti peningkatan kualitas dan profesionalisme para pelaku jasa konstruksi, sekaligus menjadi acuan bagi proses yang sedang berjalan saat ini.

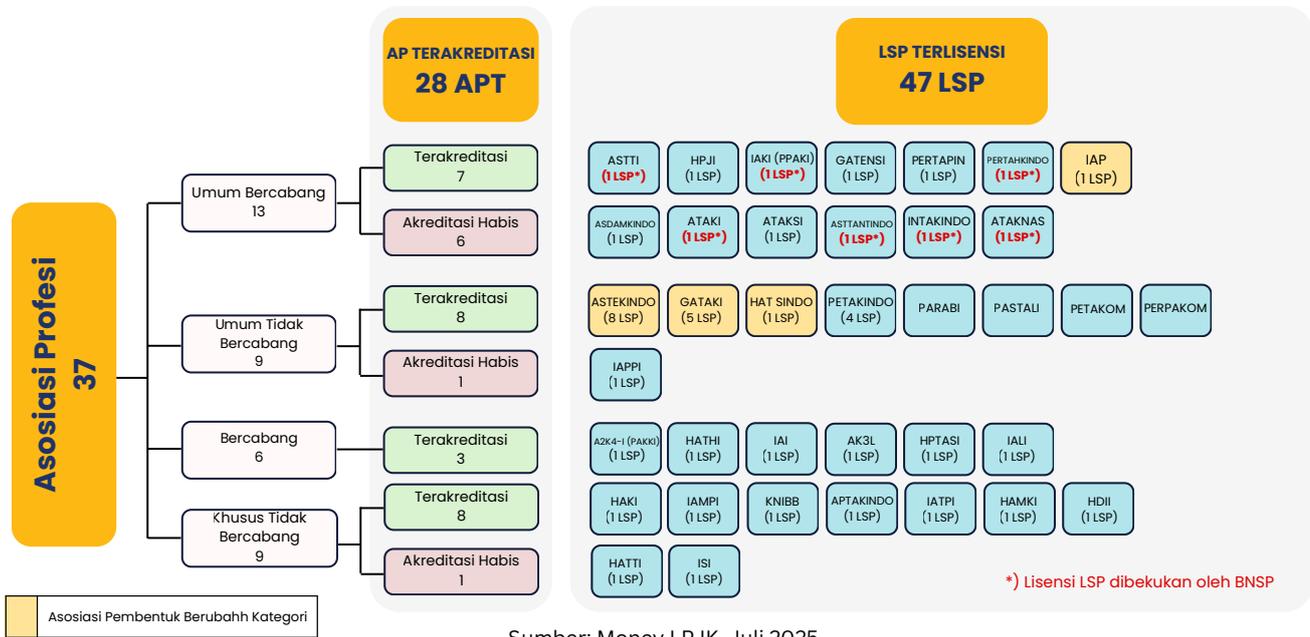


Asosiasi Pembentuk Berubah Kategori

Sumber: Monev LPJK, Juli 2025

Berdasarkan data capaian pada *batch* sebelumnya, dari total 21 Asosiasi Badan Usaha yang tercatat, 19 di antaranya telah berhasil memperoleh akreditasi. Angka ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan komitmen yang tinggi terhadap standar yang ditetapkan. Sementara itu, dua asosiasi lainnya saat ini sedang dalam status habis masa berlaku akreditasinya dan diwajibkan untuk segera mengajukan permohonan re-akreditasi.

Secara lebih rinci, distribusi akreditasi di antara berbagai jenis asosiasi adalah sebagai berikut: Asosiasi Badan Usaha Umum Bercabang: Sebanyak 6 asosiasi telah terakreditasi, dengan 1 asosiasi yang masa berlaku akreditasinya telah habis. Asosiasi Badan Usaha Umum Tidak Bercabang: 8 asosiasi berhasil terakreditasi, dan 1 asosiasi lainnya juga telah habis masa berlaku akreditasinya. Asosiasi Badan Usaha Bercabang: 3 asosiasi telah terakreditasi penuh. Dan Asosiasi Badan Usaha Terintegrasi: 2 asosiasi telah terakreditasi.



Sementara itu dari total 37 Asosiasi Profesi yang terdaftar, sebagian besar telah menunjukkan komitmen terhadap standar kualitas melalui akreditasi. Tepatnya, 28 asosiasi telah terakreditasi, menandakan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kriteria yang ditetapkan. Namun, 9 asosiasi lainnya saat ini berada dalam status habis masa berlaku akreditasinya, sehingga mereka diwajibkan untuk segera mengajukan permohonan re-akreditasi guna memastikan keberlanjutan legalitas dan pengakuan mereka.

Perincian status akreditasi berdasarkan jenis Asosiasi Profesi menunjukkan beragam kondisi: Pada kategori Asosiasi Profesi Umum Bercabang, sebanyak 7 asosiasi telah terakreditasi. Namun, ada tantangan signifikan di mana 6 asosiasi di kategori ini telah habis masa berlaku akreditasinya dan memerlukan tindakan segera untuk re-akreditasi. Untuk Asosiasi Profesi Umum Tidak Bercabang, capaiannya cukup baik dengan 8 asosiasi yang telah terakreditasi, sementara hanya 1 asosiasi yang masa berlaku akreditasinya telah habis. Asosiasi Profesi Khusus Bercabang menunjukkan performa yang solid dengan 6 asosiasi telah terakreditasi sepenuhnya. Terakhir, pada Asosiasi Profesi Khusus Tidak Bercabang, tercatat 7 asosiasi yang telah terakreditasi, namun 2 asosiasi di antaranya juga telah habis masa berlaku akreditasinya.

Dampak Akreditasi Asosiasi Dalam Meningkatkan Kredibilitas

Akreditasi asosiasi di sektor jasa konstruksi memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kredibilitas, baik bagi asosiasi itu sendiri maupun bagi seluruh ekosistem industri konstruksi, menjadikannya sebuah investasi strategis yang membawa dampak multidimensi.

Akreditasi berfungsi sebagai stempel pengakuan resmi, menandakan bahwa sebuah asosiasi telah memenuhi standar kualitas, tata kelola, dan operasional yang ketat.

Secara langsung, akreditasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota, pemerintah, mitra bisnis, dan masyarakat, serta memperkuat reputasi sebagai organisasi profesional dan berkomitmen pada keunggulan. Kepercayaan ini penting untuk menarik anggota baru, mempertahankan anggota lama, dan membentuk citra positif.

Lebih lanjut, Asosiasi terakreditasi memiliki posisi tawar lebih kuat di hadapan pemerintah dan pemangku kepentingan, sehingga lebih efektif menyuarakan kepentingan anggota, mengadvokasi kebijakan, dan berperan dalam perumusan regulasi sektor konstruksi. Dalam hal ini juga dapat membuka peluang bagi asosiasi untuk terlibat langsung dalam proses sertifikasi badan usaha dan profesi, menjelaskan peran vital mereka.

Persyaratan akreditasi asosiasi juga mencakup aspek pemberdayaan anggota, seperti program pengembangan usaha berkelanjutan (bagi Asosiasi Badan Usaha) atau pengembangan keprofesian berkelanjutan (bagi Asosiasi Profesi). Ini berarti akreditasi secara tidak langsung mendorong asosiasi untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya. Dampaknya, anggota asosiasi yang terakreditasi akan cenderung memiliki kualitas layanan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya secara kolektif meningkatkan kualitas keseluruhan proyek konstruksi di Indonesia.

Terakhir, Kementerian PU menilai akreditasi asosiasi sebagai standar dan penentu kelayakan jasa konstruksi yang efektif dan efisien. Dampaknya, akreditasi asosiasi berkontribusi pada standardisasi praktik terbaik di seluruh sektor. Ketika asosiasi-asosiasi besar dan berpengaruh telah terakreditasi, mereka akan menjadi contoh dan pendorong bagi asosiasi lain untuk memenuhi standar yang sama. Ini pada akhirnya menciptakan penjaminan mutu yang lebih luas dan berkelanjutan di industri jasa konstruksi nasional, meningkatkan daya saing secara global.

Secara keseluruhan, dari data akreditasi asosiasi jasa konstruksi, termasuk capaian *batch* sebelumnya dan tren 2025, menunjukkan komitmen kuat pemangku kepentingan. Meskipun re-akreditasi menjadi tantangan, Asosiasi Badan Usaha dan Profesi terus berupaya memenuhi standar. Proses akreditasi periodik LPJK menjadi instrumen penting menjaga kredibilitas dan profesionalisme, menjadikannya fondasi ekosistem konstruksi yang berkualitas, terpercaya, dan berkelanjutan.

Menanamkan Moral K4 dan Etika Profesi dalam Pengembangan Karakter Sumber Daya Konstruksi yang Profesional

Penulis:

Fadi Muhammad Akmal, S.T.

LPJK, Bidang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Apakah keterampilan teknis cukup untuk membangun infrastruktur yang adil dan berkelanjutan? Di tengah gegap gempita proyek infrastruktur yang menjulang dan pertumbuhan industri konstruksi yang agresif, muncul pertanyaan fundamental tentang arah moral pembangunan. Industri konstruksi bukan sekadar arena untuk adu cepat dan efisiensi biaya. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, nilai-nilai ini kerap hanya menjadi formalitas di atas kertas tender, bukan sebagai landasan karakter para profesionalnya.

K4 merujuk pada Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, empat prinsip yang seharusnya menjadi fondasi dalam sektor konstruksi. Dalam praktiknya, K4 sering kali direduksi menjadi protokol atau kelengkapan alat pelindung diri (APD), padahal lebih dari itu K4 adalah ekspresi moral dari penghargaan terhadap nyawa manusia, kualitas hidup, dan kelestarian lingkungan. Di negara-negara maju, K4 telah menjadi tolok ukur reputasi perusahaan. Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, implementasinya masih tidak maksimal, terkadang kuat di proyek pemerintah, longgar di proyek swasta, dan nyaris absen di proyek nonformal.

Etika profesi dalam konstruksi bukan hanya soal tidak melakukan korupsi. Ia adalah keberanian untuk bersikap benar meskipun tidak diawasi, kejujuran dalam pelaporan teknis, hingga komitmen untuk tidak menutup mata terhadap pelanggaran keselamatan. Tanpa etika, seorang profesional bisa menyulap laporan inspeksi, menekan biaya dengan mengorbankan mutu, atau membiarkan pekerja bekerja dalam risiko tanpa perlindungan. Etika adalah jembatan antara kemampuan teknis dan kebijaksanaan moral. Etika menuntut keberanian untuk tidak sekadar menjadi pelaksana, tapi pengawal nilai.

Etika profesi sangat penting dalam konstruksi karena menjadi fondasi untuk menjamin integritas, mutu, dan kepercayaan publik, sekaligus memastikan penerapan K4 yang konsisten demi keberlangsungan proyek dan keselamatan semua pihak.



Sumber: Lomba Foto Konstruksi Indonesia, 2019

Indonesia juga pernah mengalami insiden konstruksi yang menjadi pengingat betapa pentingnya keselamatan dan etika dalam setiap tahap pembangunan. Salah satu contohnya adalah kecelakaan kerja pada proyek jalan layang di kawasan Jakarta pada tahun 2021 yang menyebabkan korban luka dan gangguan konstruksi. Temuan pascakejadian mengindikasikan bahwa faktor tekanan terhadap jadwal penyelesaian proyek turut mempengaruhi pengambilan keputusan di lapangan.

Peristiwa tersebut tidak dimaknai sebagai kegagalan, melainkan sebagai momen refleksi nasional bahwa dalam tekanan waktu dan pencapaian target, nilai-nilai keselamatan harus tetap menjadi komitmen utama. Hal ini mengingatkan bahwa pembangunan tidak semata soal menyelesaikan struktur, tapi tentang menjaga martabat dan keselamatan semua pihak yang terlibat.

Sebaliknya, berbagai proyek pembangunan di Indonesia juga mulai menampilkan praktik-praktik yang menunjukkan arah kemajuan. Beberapa proyek strategis kini menerapkan pendekatan keberlanjutan dan pelibatan sosial sejak tahap perencanaan. Ada pula proyek bendungan dan infrastruktur kawasan yang mengikutsertakan akademisi serta organisasi masyarakat sipil dalam menilai aspek sosial dan lingkungan, sebagai upaya memperkuat akuntabilitas publik.

Di tingkat pelaksanaan, semakin banyak pelaku konstruksi yang mengadopsi pelaporan insiden berbasis digital, mengadakan pelatihan keselamatan secara berkala, serta membangun sistem audit internal untuk memastikan bahwa prinsip K4 berjalan tidak hanya di atas kertas, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja harian.

Indonesia berada dalam fase pembangunan masif. Proyek-proyek strategis nasional menjamur, dari tol laut hingga IKN. Namun, di balik keberhasilan angka makro, masalah mikro terus membayangi, di antaranya tingkat kecelakaan kerja di sektor konstruksi yang masih termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara, serta kepatuhan K4 sering hanya aktif saat ada inspeksi atau proyek besar.

Namun, tidak semua kabar buruk. Sejak 2015, Kementerian PU telah memasukkan nilai-nilai K4 dalam proses tender dan pengawasan proyek. Program pelatihan dan audit K4 juga semakin diperluas. Beberapa perusahaan BUMN mulai menjadikan *Safety Culture* sebagai DNA perusahaan.

Mengimplementasikan moral K4 dan etika profesi di sektor konstruksi Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. Proses ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dari kementerian teknis, perusahaan konstruksi besar dan kecil, akademisi, hingga komunitas tenaga kerja. Namun di lapangan, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa prinsip-prinsip luhur ini seringkali tersandera oleh realitas kompleks seperti kepentingan ekonomi, politik lokal, keterbatasan Sumber Daya Manusia, serta lemahnya budaya kepatuhan.

Hambatan Implementasi

1. Budaya Proyek yang Fokus pada Target Fisik dan Biaya

Keberhasilan proyek, terutama di sektor pemerintah, masih diukur dari ketepatan waktu dan anggaran, sementara aspek seperti keselamatan kerja dan partisipasi masyarakat sering dianggap sekunder.

2. Pengawasan Lapangan yang Lemah

Meski aturan sudah ada, pengawasan di daerah terbatas akibat kurangnya pengawas profesional dan adanya kompromi antara pengawas dan kontraktor.

3. Minimnya Pendidikan Karakter di Vokasi dan Teknik

Kurikulum pendidikan teknik dan vokasi belum mengintegrasikan etika profesi dan moral K4 secara menyeluruh, masih dominan pada aspek teknis.

4. Tender Tidak Mendorong Kepatuhan Etika

Sistem tender lebih menekankan harga terendah daripada rekam jejak etika atau komitmen keberlanjutan, merugikan perusahaan yang memprioritaskan K4.

5. Ketimpangan SDM antara Penyedia Jasa Kualifikasi Besar dan Kecil

Penyedia Jasa Kualifikas besar memiliki SDM dan sistem mutu untuk menerapkan K4, sedangkan Penyedia Jasa Kualifikasi kecil kekurangan pelatihan, teknologi, dan bimbingan.

6. Regulasi Tidak Selaras dengan Realitas Sosial

Standar K4 dan penggunaan APD sering tidak sesuai dengan budaya lokal atau kebiasaan pekerja, sehingga sulit diterapkan tanpa pendekatan sosial-budaya.

Faktor yang Mendukung Implementasi

1. Kebijakan Strategis dari Kementerian PU

Kementerian PU terus memperkuat instrumen hukum seperti Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Regulasi ini mendorong Penyedia Jasa untuk memiliki sistem keselamatan yang terukur dan terdokumentasi.

2. Peran Lembaga Sertifikasi dan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Lembaga seperti LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) memainkan peran penting dalam mengembangkan sertifikasi profesi yang tak hanya teknis tapi juga etis. Ini adalah langkah awal membentuk karakter profesional sejak dini.

3. Meningkatnya Kesadaran Publik dan Tekanan Sosial

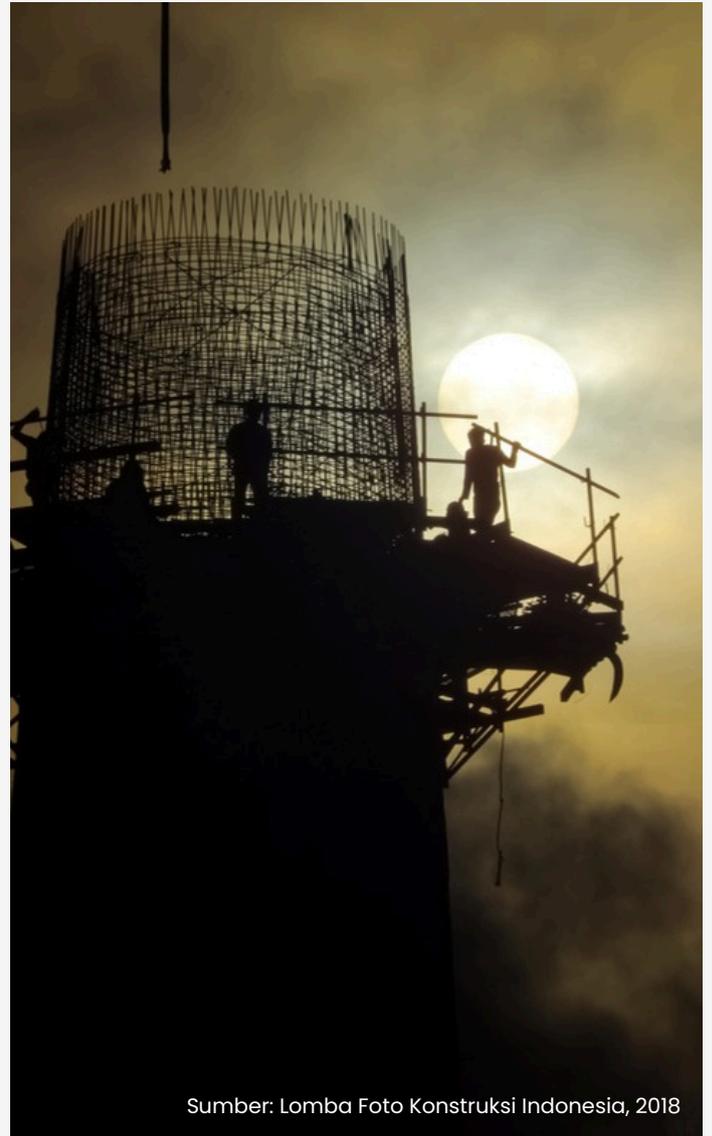
Kasus-kasus kecelakaan konstruksi yang viral di media sosial membuat publik semakin sadar akan pentingnya aspek keselamatan dan akuntabilitas. Hal ini secara tidak langsung memaksa pelaku industri untuk lebih transparan dan bertanggung jawab.

4. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan LSM

Beberapa proyek pembangunan mulai melibatkan akademisi untuk mengevaluasi aspek keberlanjutan dan sosial. Di sisi lain, LSM yang bergerak di bidang lingkungan atau hak buruh mulai aktif mengawasi proyek-proyek infrastruktur besar.

5. Inisiatif Digitalisasi Proyek dan Transparansi Anggaran

Sistem *e-procurement* dan BIM (*Building Information Modeling*) turut mendukung implementasi nilai-nilai etika dan K4, karena



Sumber: Lomba Foto Konstruksi Indonesia, 2018

membantu transparansi dan perencanaan yang lebih detail sejak awal.

6. Regulasi Perlindungan *Whistleblower* dan Sistem Aduan Publik

Meskipun belum sepenuhnya optimal, Indonesia sudah memiliki mekanisme perlindungan pelapor pelanggaran yang dapat membantu mengungkap praktik tidak etis di lapangan, khususnya pada proyek pemerintah.

Agar moral K4 dan etika profesi tidak hanya menjadi jargon, berikut langkah yang bisa ditempuh berbagai pihak:

1. Integrasikan evaluasi karakter dan integritas dalam sistem *reward* proyek dan pengadaan.
2. Perkuat pengawasan proyek.
3. Merancang kurikulum teknik dan vokasi yang lebih humanis dan etis.
4. Dorong pelatihan rutin tentang hak-hak dasar tenaga kerja dan standar K4.
5. Libatkan media dalam mengangkat isu keberhasilan atau pelanggaran K4 secara edukatif.

Dengan pendekatan sistemik dan kolaboratif, prinsip moral K4 dan etika profesi bisa menjadi roh yang menggerakkan kemajuan industri konstruksi Indonesia. Bukan hanya soal membangun jalan dan gedung, tapi juga membangun nilai, karakter, dan keadaban.

Rekomendasi

- **Pemerintah Pusat:** Jadikan kepatuhan terhadap etika profesi sebagai syarat pencairan termin proyek.
- **Pendidikan Tinggi:** etika profesi harus menjadi mata kuliah wajib yang tidak hanya diajarkan, tetapi dilatih melalui simulasi kasus nyata.
- **Badan Usaha Jasa Konstruksi:** Jadilah teladan budaya etis, jangan hanya mengejar ISO tetapi hidupkan nilai-nilainya.
- **Masyarakat Umum dan Media:** Tekan terus kesadaran kolektif bahwa pembangunan tanpa moral adalah kegagalan kolektif.

Dalam dunia konstruksi, kita terbiasa menghitung volume beton, panjang baja, dan jumlah tenaga kerja. Tapi satu hal yang belum banyak dihitung adalah karakter. Karakter bukan sekadar niat baik, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, keputusan-keputusan kecil yang diambil dalam tekanan, yang dapat menentukan apakah sebuah konstruksi hanya akan berdiri kokoh atau benar-benar menjadi simbol integritas dan tanggung jawab.

Dalam proyek sebesar apapun, karakter dapat menentukan keberhasilan jangka panjang. Tanpa karakter, ketepatan hitungan teknis bisa runtuh oleh kelalaian atau kecurangan. Tapi dengan karakter, setiap bagian dari proses konstruksi menjadi lebih dari sekadar pekerjaan.

Maka, di balik setiap bangunan yang berdiri, semoga ada manusia-manusia yang berdiri lebih kokoh karena karakter merekalah yang sesungguhnya menopang segalanya. Moral K4 dan etika profesi bukan aksesoris, melainkan adalah fondasi tak kasat mata yang menopang pembangunan dan kemajuan infrastruktur.

Digitalisasi Sektor Konstruksi: Inovasi, Integrasi, dan Profesionalisme Bersama LPJK

Penulis:

Annik Noer Nawarni, SE., Bryan Sudibyo, S.T., dan Reynald Fitriyadi, S.Kom.
LPJK, Bidang Teknologi Informasi (IT)

Menuju Transformasi Digital yang Nyata di Sektor Konstruksi

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara proaktif melakukan transformasi digital. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022, dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2023 yang menjadi pilar penguatan arah kebijakan internal. Sebagai bentuk nyata, Kementerian PU telah menjalankan berbagai inisiatif digitalisasi dan kompetisi antar unit, seperti Penilaian Transformasi Digital tahunan. Penilaian ini mencakup berbagai aspek mulai dari struktur organisasi, alur kerja, data, hingga teknologi. Indikatornya menunjukkan bahwa kinerja Kementerian PU terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dasar Hukum Transformasi Digital

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Transformasi ini bukan sekadar teknologi, melainkan juga perubahan budaya kerja. Penerapan teknologi digital ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan layanan publik yang lebih cepat. Seluruh pegawai Kementerian PU mulai dari pimpinan hingga petugas operasional terlibat langsung dalam memastikan keberlanjutan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pendekatan adaptif selalu diterapkan agar layanan berbasis digital dapat merespon cepat kebutuhan masyarakat dan perubahan regulasi.

Digitalisasi di Kementerian PU menjadi strategi utama dalam mempercepat proses perizinan, transparansi informasi serta efisiensi pengelolaan infrastruktur dan sumber daya. Di sisi

infrastruktur, teknologi *Internet of Things (IoT)* mulai diterapkan dalam bentuk sensor pada alat berat, pelacakan pergerakan struktur, hingga pengawasan keselamatan. Data dari perangkat-perangkat tersebut dialirkan ke dalam sistem berbasis *cloud* untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Kementerian PU telah mengintegrasikan layanan perizinan berusaha dengan sistem *Online Single Submission (OSS)* untuk mempermudah proses perizinan seperti SBU, SKK, perusahaan sumber daya air, utilitas jalan dan SIMBG.



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai unit non-struktural di bawah Kementerian PU, mengemban peran penting dalam pengelolaan dua sistem utama, yaitu SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia) dan e-SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengalaman).

SIKI berperan sebagai sistem pendukung utama dalam proses perizinan berusaha di sektor jasa konstruksi, khususnya terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), serta lisensi lainnya. Sementara itu, e-SIMPAN menyediakan data

pengalaman badan usaha dan tenaga kerja yang digunakan sebagai dasar verifikasi perizinan serta persyaratan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PU. Integrasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan jasa konstruksi yang efisien, berbasis data, dan siap menjawab tuntutan era digital.

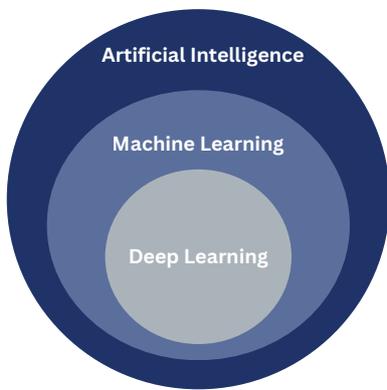
Era AI Generatif: Apakah LPJK sudah mengimplementasikan AI?

Kita sedang memasuki era baru: AI Generatif. Setelah melewati masa manual dan digital, kini AI dimanfaatkan untuk mengotomatisasi entri data, mengenali pola, memberikan rekomendasi, menyusun laporan, bahkan menyarankan kebijakan.

LPJK telah menyelenggarakan workshop khusus AI Generatif, memperkenalkan aplikasi seperti Gemini dan GitHub Copilot, dan memperluas penggunaan AI dari fungsi administratif ke fungsi yang lebih strategis, seperti perencanaan pengadaan, penilaian risiko konstruksi, dan evaluasi proyek. Selain mempercepat analisis dokumen, AI juga membuka peluang baru dalam memprediksi tren risiko, estimasi tenaga kerja, hingga analisis pola keselamatan kerja. Proses ini meningkatkan efisiensi sekaligus ketepatan pengambilan keputusan.

LPJK dalam melaksanakan tugas sebagaimana Amanah PP no 14 tahun 2021 telah didukung dengan sistem informasi untuk seluruh proses layanan LPJK menggunakan: Sistem Informasi Manajemen (SIM), *Decision Support System (DSS)*, *Online Analytical Processing (OLAP)*, *Business Intelligence (BI)*, dan *Big Data Analytics* serta telah menerapkan integrasi dengan API.

Menjawab tantangan sekaligus peluang bagi LPJK untuk terus bertransformasi menuju layanan yang lebih cerdas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, salah satu Pengurus LPJK, Ketua Bidang II menginisiasi agar memanfaatkan fondasi sistem informasi yang telah dimiliki, untuk penyiapan layanan publik berupa *chatbot* interaktif berbasis AI. Meskipun belum diluncurkan, AI ini telah diberi nama **Smart AG**.



Gambar Hierarki dan Hubungan antara Tiga Konsep Utama dalam Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Tantangan AI dan Langkah Mitigasi LPJK

Tantangan terbesar LPJK dalam penerapan AI terletak pada kesiapan infrastruktur dan fondasi teknis yang mendukung. Mengingat untuk menerapkan AI maka perlu dipastikan integrasi *real-time*, daya yang bersih, terstruktur dan relevan, membutuhkan machine learning atau generatif, serta ketahanan dan keamanan sistem. Disamping itu, tantangan non teknis juga harus dihadapi, seperti kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang AI, kebijakan dan perubahan paradigma pengambilan keputusan berbasis data.

Beberapa langkah awal penting yang sudah dilakukan LPJK dalam kerangka transformasi digital LPJK menuju penerapan AI yang lebih luas, di antaranya :

- Digitalisasi sertifikat yang memungkinkan pengelolaan dan verifikasi lebih cepat dan transparan
- Sistem validasi keabsahan melalui jakontrust dan laman web LPJK dengan fitur verifikasi berbasis QR dan API.
- Dashboard analitik yang menampilkan kinerja baik badan usaha maupun tenaga kerja konstruksi secara *real-time*
- Otomatisasi dalam proses perizinan berusaha, yang mempercepat layanan dan mengurangi potensi kesalahan manual
- Pemetaan klasifikasi permohonan berbasis *rule-based* automation menggunakan kata kunci
- Integrasi sistem melalui API pada SIKI dan e-SIMPAN yang telah terhubung dengan Portal Perizinan yang tergabung OSS, LKPP, SIKOMPAK, SIMPK, SIPBJ, LSP, dan LSBU.
- Pengelolaan data yang lebih terstruktur dan siap dianalisis sebagai fondasi pengembangan sektor jasa konstruksi nasional

Sinergi Menuju Layanan Publik yang Modern dan Adaptif

LPJK kini tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga berperan dalam menentukan arah kebijakan digital sektor konstruksi nasional sejalan dengan visi SPBE yang mendorong layanan publik berbasis data, adaptif, dan terintegrasi. Melalui interoperabilitas data antar kementerian dan harmonisasi arsitektur layanan digital, LPJK memperkuat kebijakan internal dan tata kelola data demi keterbukaan, efisiensi, dan keamanan. Transformasi digital ini menjadi komitmen jangka panjang untuk menghadirkan layanan konstruksi publik yang cepat, tepat, transparan, dan berkualitas bagi Indonesia yang lebih maju.

Acara pembukaan berlangsung meriah dan sarat makna, diawali dengan penampilan tari tradisional yang memukau sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia, sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi. Penampilan ini berhasil mencuri perhatian para tamu undangan dan peserta pameran dari dalam maupun luar negeri, memberikan nuansa yang kaya akan nilai-nilai lokal di tengah suasana teknologi dan inovasi yang mendominasi acara. Setelah penampilan pembuka, rangkaian sambutan disampaikan oleh berbagai perwakilan institusi dan organisasi penting, termasuk tokoh-tokoh nasional di bidang konstruksi, arsitektur, serta pejabat dari kementerian terkait.



Sumber: Dokumentasi LPJK, 2025

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Dr.-Ing Ir. Ilham Akbar Habibie, M.B.A., IPU, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara inovasi, teknologi, dan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai kunci kemajuan industri konstruksi dan desain di Indonesia. Pakar aeronautika lulusan Technische Universität München, Jerman, ini juga menegaskan bahwa IndoBuildTech bukan hanya ajang pameran, tetapi merupakan wahana strategis untuk mendorong transformasi industri konstruksi menuju era yang lebih modern dan cerdas. Tak luput, beliau juga mengajak generasi muda serta pelaku industri untuk terus bersinergi, berkreasi, dan turut serta membangun Indonesia yang unggul dan kompetitif di kancah global.

Didukung oleh 47 mitra pendukung dari Kementerian dan Lembaga Asosiasi di bidang Jasa Konstruksi, pameran ini tidak hanya menjadi etalase inovasi sektor bangunan dan interior. Tetapi juga menjadi ruang strategis untuk membangun jejaring bisnis, menjajaki kerja sama, serta berdiskusi tentang arah pengembangan industri konstruksi nasional. Selain berbagai produk yang inovatif, IndoBuildTech 2025 juga menghadirkan berbagai program unggulan seperti forum diskusi, kompetisi, serta seminar teknis yang menghadirkan pembicara dari asosiasi profesi, akademisi, hingga pelaku industri.



Sumber: Dokumentasi LPJK, 2025

Kehadiran LPJK dalam IndoBuildTech 2025 menjadi salah satu daya tarik tersendiri di tengah hiruk pikuk pameran. Dengan mengusung tema “Peningkatan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi melalui Forum Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Forum Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB)”, LPJK memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan informasi terkait pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Menggandeng beberapa Asosiasi di bidang Jasa Konstruksi, Universitas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), LPJK berhasil menyelenggarakan kegiatan interaktif yang ramai dikunjungi sejak hari pertama. Dalam kegiatan ini, LPJK melaksanakan program

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pemenuhan nilai Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) yang menjadi syarat perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) bagi Tenaga Kerja Konstruksi.

Pemenuhan SKPK Tenaga Kerja Konstruksi saat ini menjadi salah satu fokus utama LPJK, mengingat cukup banyak Tenaga Kerja Konstruksi yang masa berlaku sertifikasinya akan habis di akhir tahun 2025, tetapi nilai SKPK-nya belum memenuhi syarat untuk perpanjangan SKK. Tidak hanya program PKB, terdapat juga program Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB) yang dilaksanakan bersama asosiasi ARKINDO.

Selain bersama asosiasi, LPJK juga mengundang BUMN karya, salah satunya adalah PT PP (Persero) yang ikut serta mengisi topik dengan judul “Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Jasa Konstruksi Rancang Bangun Berbasis Kompetensi & Teknologi”. Dalam topik ini dijelaskan bagaimana perbedaan konsep desain konstruksi konvensional dengan konsep *design & build construction*, dimana salah satu perbedaannya adalah pada konsep desain konstruksi konvensional, proses pelaksanaan konstruksi baru bisa berjalan setelah proses perancangan selesai dikerjakan dan setelahnya dilakukan proses tender untuk memilih kontraktor.

Sedangkan pada konsep *design & build construction*, perusahaan menangani kedua aspek desain dan konstruksi. Hal ini memungkinkan proses desain dan konstruksi dapat berjalan secara paralel. Ini juga memberikan kelebihan secara pelaksanaan dapat lebih memangkas waktu dan lebih fleksibel dalam pengembangan desain sesuai kondisi di lapangan.

Pada hari terakhir keempat pameran, LPJK membuka sesi konsultasi terkait Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK Konstruksi), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), e-SIMPAN, Penilai Ahli, dll. Antusiasme pengunjung mulai dari pelaku usaha jasa konstruksi hingga mahasiswa teknik, mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya legalitas dan kompetensi profesional dalam sektor ini. Partisipasi aktif LPJK dalam IndoBuildTech sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang unggul dan tersertifikasi. Kolaborasi semacam ini diyakini akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing sektor konstruksi nasional di kancah global.

Penyelenggaraan IndoBuildTech 2025 - Part 1 bukan hanya mempertemukan para pelaku industri konstruksi dan arsitektur dalam satu ruang besar di ICE BSD, melainkan juga mempertegas arah perkembangan menuju sektor konstruksi yang lebih profesional, modern, dan terintegrasi. Di tengah tantangan global dan percepatan digitalisasi, momentum ini menjadi pengingat bahwa inovasi dan kolaborasi adalah kunci utama untuk terus melaju. Lebih dari sekadar pameran, kegiatan ini merupakan wujud nyata pembelajaran berkelanjutan dan penguatan kapasitas SDM konstruksi Indonesia. Suatu langkah penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa legalitas, kompetensi, dan profesionalitas bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang menuju industri jasa konstruksi yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Sebagai kelanjutan dari semangat ini, **IndoBuildTech 2025 Part 2** dijadwalkan akan kembali digelar pada tanggal **6-9 November 2025**, masih di lokasi yang sama, ICE BSD City. IndoBuildTech Part 2 diharapkan menjadi ruang lanjutan bagi LPJK dan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk melanjutkan dialog, pembinaan, dan penguatan kompetensi profesional di tingkat nasional.



Liputan Khusus : Tantangan, Peluang, dan Strategi Pengembangan Profesionalisme dalam Industri Jasa Konstruksi Indonesia

Narasumber:

Sibarani Sofian MUDD, B. Arch, LEED AP

Ketua IARKI dan Pemenang Sayembara IKN dalam Desain Ibu Kota Negara

Di tengah gempuran perubahan teknologi, isu lingkungan global, dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, industri jasa konstruksi Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Salah satu sosok yang berada di garis depan transformasi ini adalah Sibarani Sofian, arsitek kota sekaligus Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), yang telah mengabdikan 25 tahun kariernya untuk merancang dan membangun kota—baik di Indonesia maupun di kancah internasional.

Mengisi Celah Skala Pembangunan Kota

Sibarani mengawali kisahnya dengan menjelaskan profesi yang kerap luput dari perhatian publik: arsitek kota atau *urban designer*. Berbeda dari arsitek gedung yang fokus pada skala mikro dan perencana tata ruang (*planolog*) yang berpikir di skala makro, arsitek kota mengisi celah di antaranya—skala meso—yang memadukan visi kawasan dan detail bangunan.

“Kalau planologi berhenti di peta 1:5000, arsitek bekerja di 1:500, kami di Rancang Kota bisa bermain di antara 500 hingga 5000. Kami bisa *zoom in* dan *zoom out* seperti main SimCity,” ujarnya.

Lahir dari persilangan dua dunia (*planologi* dan arsitektur), Sibarani mengisi celah yang jarang tersentuh: skala menengah atau meso. Di tangan seorang arsitek kota, sebuah garis pada peta bukan sekadar tanda, melainkan awal dari sebuah peradaban baru.

Dari Singapura dan Hongkong, Kembali untuk Indonesia

Perjalanan profesionalnya membentang lintas benua. Pernah bekerja di perusahaan multinasional di Singapura dan Hongkong, Sibarani terbiasa dengan standar global dan kolaborasi multidisiplin: dari insinyur sipil, ahli ekologi, hingga *marine biologist*.

Namun, ia memilih pulang. “Di luar negeri, tanpa saya pun sistemnya tetap berjalan. Di Indonesia, dampak yang bisa saya berikan jauh lebih besar,” tuturnya.

Baginya, mengaplikasikan teknologi dan standar global untuk membangun kota-kota tanah air adalah panggilan yang tak bisa diabaikan.

Tak hanya itu, mereka mengusung *Eco Park* Pancasila, sebuah ruang publik yang memvisualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk fisik: Sila ketuhanan diwujudkan melalui kompleks keagamaan enam agama yang diakui pemerintah. Kemanusiaan yang adil dan beradab diterjemahkan dalam museum peradaban.

Persatuan Indonesia hadir dalam bentuk api persatuan sebagai obor abadi. Sila keempat tentang musyawarah divisualisasikan melalui pasar yang memberikan hak sama untuk semua orang dalam berusaha. Sedangkan keadilan sosial bagi selua rakyat Indonesia diwujudkan dalam plaza demokrasi, tempat masyarakat dapat mengekspresikan aspirasinya.

“Filosofinya sangat Indonesia, tapi standarnya internasional. Kita harus *stay relevant* dengan tren dunia tanpa kehilangan identitas.”

Kemenangan tim Sibarani dalam sayembara IKN bukan kebetulan. Proyek ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multiskala, dengan luas area 220 ribu hektare atau empat kali lipat DKI Jakarta, IKN menuntut kemampuan berpikir dari skala makro hingga detail mikro.



Sumber: URBAN+



Sumber: URBAN+



Profesionalisme di Era 4.0 dan 5.0

Bagi Sibarani, profesional jasa konstruksi di masa kini tak cukup hanya mahir menggambar atau memahami konstruksi. Mereka harus menguasai lima kompetensi kunci:

1. Melek teknologi: dari AI hingga GeoBIM untuk manajemen kota berbasis data.
2. Kesadaran lingkungan: mengintegrasikan *green building*, *climate resilience*, dan efisiensi energi.
3. Berpikir terintegrasi: menggabungkan berbagai disiplin dalam satu visi pembangunan.
4. Mengadopsi inovasi: memanfaatkan *nature-based solutions* dan metode berkelanjutan lainnya.
5. Keterbukaan kolaboratif: membangun sinergi lintas keilmuan dan lintas sektor.

**Dunia bergerak cepat. Kita tak boleh hanya
future waiting, tapi harus *future ready*.**

- Sibarani Sofian -

Sistem Pengadaan : Potensi yang Terkunci

Meski optimis, ia tak menutup mata pada hambatan sistemik. Banyak profesional diaspora atau yang berpengalaman internasional sulit menembus proyek pemerintah karena perbedaan standar sertifikasi dan mekanisme pengadaan.

Ia menyoroti sistem pengadaan pemerintah yang masih memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi profesional diaspora, khususnya terkait perbedaan standar sertifikasi. Ia mendorong adanya penyetaraan lisensi internasional dan pembukaan akses bagi talenta terbaik untuk terlibat dalam proyek-proyek nasional.

Ahli Perkotaan: Pasien yang Kekurangan Dokter Spesialis

Indonesia memiliki lebih dari 500 kota dan kabupaten, hanya kurang dari 10% yang memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Anggota IARKI hanya sekitar 600 orang. Jumlah ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penataan kota yang sehat dan berkelanjutan. “Kota itu seperti pasien. Kalau tidak ada spesialisnya, penyakitnya tidak akan tertangani,” ujarnya.

Ia mengajak pemerintah menciptakan *demand* yang jelas agar lebih banyak profesional terjun ke bidang rancang kota.

Pesan untuk Generasi Muda: Tetap Relevan

Menutup perbincangan, Sibarani mengirimkan pesan sederhana namun kuat untuk generasi muda, “*Stay relevant*. Dunia berubah cepat. Kuasai teknologi, buka diri pada kolaborasi, dan siap menghadapi disrupsi. Kita membangun bukan hanya kota, tapi masa depan bangsa.”

Visi Indonesia 2045

Menuju Indonesia Maju 2045, ia membayangkan kolaborasi erat antara arsitek, perancang kota, dan planolog, bekerja sama membentuk kota yang inklusif, berkelanjutan, dan membanggakan.

“Transformasi kota adalah transformasi bangsa. Kalau kota-kotanya sehat, masyarakatnya pun akan lebih sejahtera,” pungkasnya.

Sumber : Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PU, 2025



TTS Buletin LPJK



Tata Cara Pengerjaan:

1. Scan QR Code yang tersedia di bawah.
2. Isi biodata pada form.
3. Jawab pertanyaan TTS melalui form tersebut.
4. Penjawab tercepat dan benar akan dihubungi oleh pihak LPJK.



ACROSS

3. Entitas yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
5. Pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan
10. Izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi jasa konstruksi
13. Sektor utama yang menjadi perhatian utama Kementerian PUPR dan LPJK.
14. Lembaga sertifikasi profesi di bidang jasa konstruksi.
15. Organisasi berbadan hukum yang mawadahi usaha terkait material konstruksi

DOWN

1. Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha
2. Penilaian resmi terhadap lembaga pelatihan atau sertifikasi untuk menjamin kualitasnya
4. Proses verifikasi dan validasi terhadap pengalaman badan usaha/profesi yang telah tercatat pada SIUKT
6. Orang yang ditugaskan melakukan asesmen terhadap tenaga ahli konstruksi
7. Organisasi profesi yang menaungi para pelaku jasa konstruksi.
8. Lembaga non struktural dibawah menteri PU
9. Sistem informasi LPJK untuk layanan tenaga kerja konstruksi.
11. Badan nasional yang bertugas menetapkan standar kompetensi profesi nasional
12. Aplikasi yang disediakan LPJK untuk keperluan manajemen pengalaman
16. Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi
17. Kelompok Kerja



Selamat dan sukses

atas pelantikan



Wida Nurfaida, S.T., M.T.
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum



Bobby Ali Azhari, ST, M.Sc.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum



Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.
Inspektur Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum



Dr. Dwi Purwantoro, S.T., M.T.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum

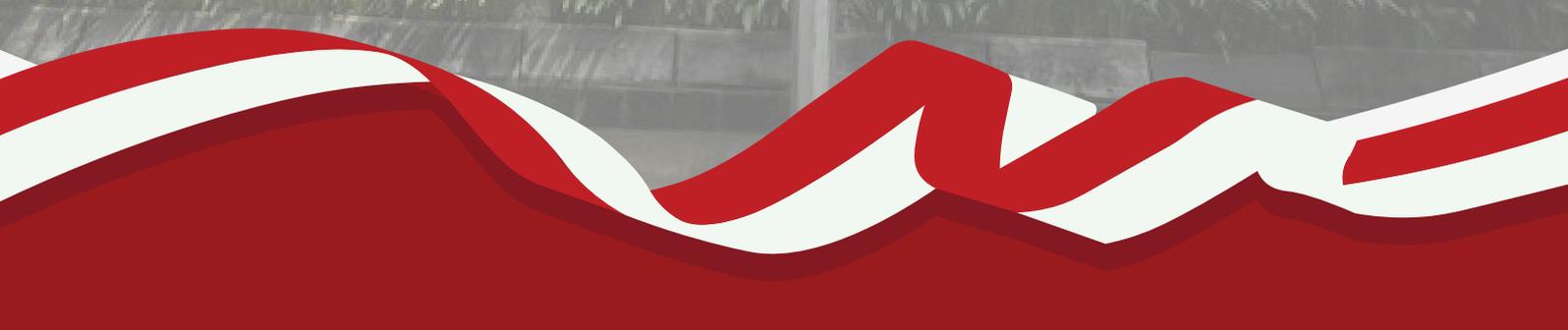


Bisma Staniarto, S.T., M.Sc.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum



Apri Artoto, S.T., M.P.P.M.
Kepala BPSDM
Kementerian Pekerjaan Umum

**Selamat menjalankan amanah
membawa pembangunan Indonesia
menjadi lebih maju**



Gambaran Pelaku Usaha Jasa Konstruksi Menghadapi Dinamika Jasa Konstruksi Masa Depan

Penulis:

Wiworo Setyoningrum S.A; Andi Muhammad Iqrar S.Tr.T.
LPJK, Bidang Rencana Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi

Peran Strategis Sektor Jasa Konstruksi

Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB meningkat rata-rata 5% per tahun pada periode 2019 sampai dengan 2024 dengan nilai rata-rata kontribusi senilai 10,6% dari PDB Nasional dan menempati urutan kelima dari sektor-sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peran strategis Sektor konstruksi tercermin dari keterkaitannya dengan berbagai sektor ekonomi lainnya. Selain menciptakan peluang bagi pelaku usaha jasa konstruksi, sektor konstruksi dapat menciptakan investasi bagi sektor lain di antaranya pada sektor transportasi, sektor perdagangan, peningkatan UMKM dan lain sebagainya. Dengan demikian, Sektor konstruksi tidak hanya berdampak kepada pembangunan fisik, namun juga pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menetapkan efisiensi pada beberapa

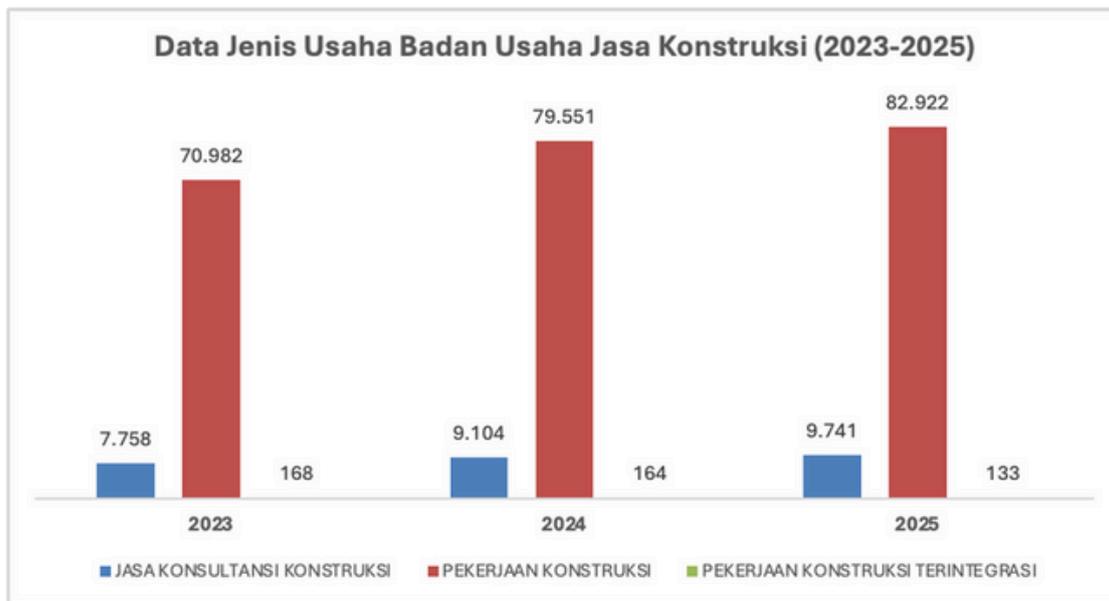
Sektor konstruksi tidak hanya berdampak kepada pembangunan fisik, namun juga pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) yang mengalami pemotongan APBN dari sebelumnya Rp 116,23 Triliun menjadi Rp 75,63 Triliun. Hal ini berimplikasi pada penurunan program infrastruktur fisik Kementerian PU sehingga muncul kecemasan pelaku usaha jasa konstruksi terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja dan volume pekerjaan konstruksi.

Perubahan kebijakan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa konstruksi ini akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, laju pertumbuhan ekonomi, dan kualitas penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, pelaku usaha jasa konstruksi perlu beradaptasi untuk tetap berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Gambaran Badan Usaha Jasa Konstruksi

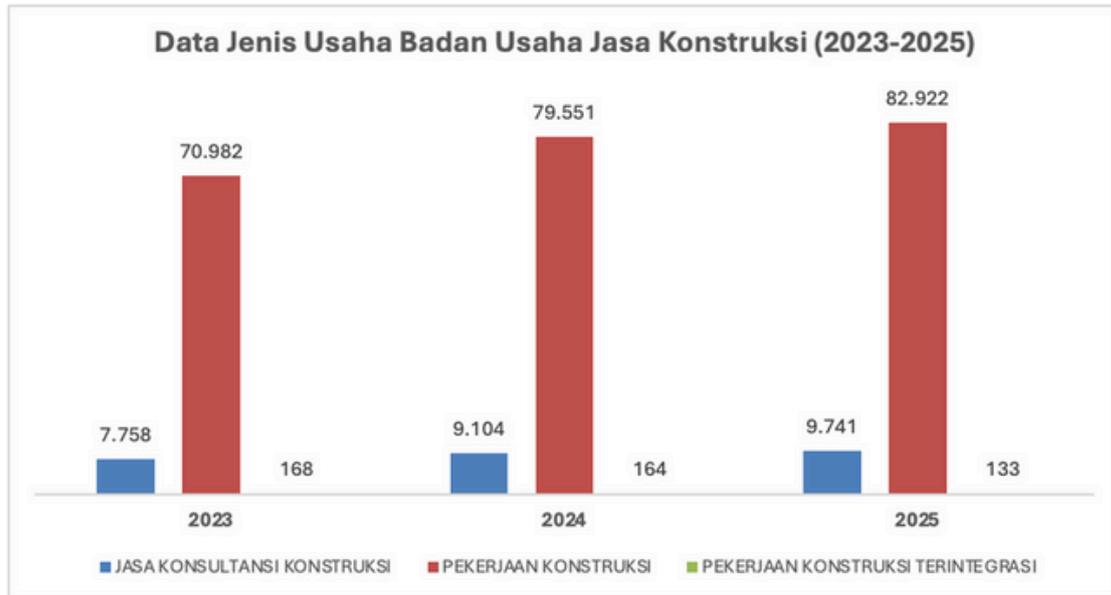
Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) merupakan pemeran utama dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Total jumlah BUJK meningkat secara keseluruhan, dari 78.908 BUJK pada tahun 2023 menjadi 92.796 BUJK pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mengindikasikan dinamisme dan daya tarik sektor konstruksi secara umum.



Sumber: Data LPJK, Juli 2025

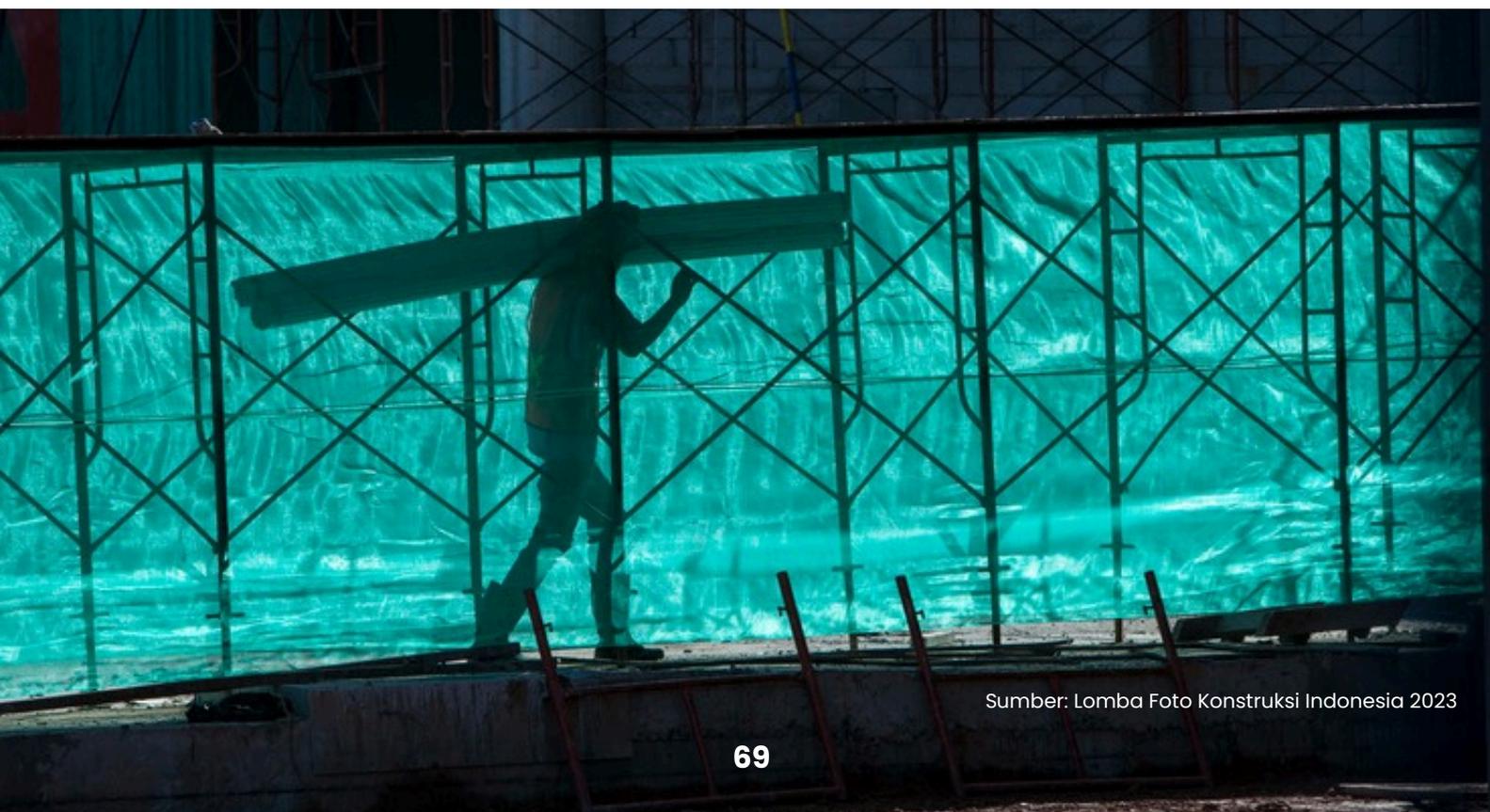
- BUJK Kualifikasi "Kecil" mendominasi pasar dan menunjukkan pertumbuhan yang sangat substansial, melonjak dari 67.743 BUJK pada tahun 2023 menjadi 82.546 BUJK pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan peran krusial segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem konstruksi nasional.
- Sebaliknya, kualifikasi "Menengah" menunjukkan penurunan yang konsisten dan tajam, dari 6.902 BUJK pada tahun 2023 menjadi 3.941 BUJK pada tahun 2025.
- Kualifikasi "Besar" juga menunjukkan fluktuasi, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2024 sebelum kemudian menurun di tahun 2025 menjadi 1.183 BUJK, lebih rendah dari angka tahun 2023 (1.282 BUJK).
- Di sisi lain, kualifikasi "Spesialis" menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif, dari 2.981 BUJK pada tahun 2023 menjadi 5.126 BUJK pada tahun 2025.

Kecenderungan peningkatan BUJK spesialis ini menunjukkan bahwa kualifikasi usaha jasa konstruksi semakin fokus pada layanan yang lebih terspesialisasi. BUJK Kualifikasi "Besar" dan "Menengah" menghadapi tantangan yang lebih besar seperti adanya efisiensi anggaran pemerintah dan persaingan usaha yang semakin ketat. Sementara itu, BUJK Kualifikasi "Kecil" dan "Spesialis" memiliki peluang yang lebih besar karena adanya kemudahan persyaratan dan peningkatan permintaan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pasar konstruksi sedang bergeser tercermin dari peningkatan jumlah BUJK Kualifikasi Kecil dan permintaan yang tumbuh untuk keahlian spesialis.



Sumber: Data LPJK, Juli 2025

- Pekerjaan Konstruksi tetap menjadi jenis usaha terbesar dan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari 70.982 BUJK pada tahun 2023 menjadi 82.922 BUJK pada tahun 2025.
- Jasa Konsultansi Konstruksi juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, dari 7.758 BUJK menjadi 9.741 BUJK dalam periode yang sama (2023-2025).
- Disisi lain, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi menunjukkan penurunan dari 168 BUJK pada tahun 2023 menjadi 133 BUJK pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pasar untuk layanan terintegrasi mungkin tidak berkembang secepat yang diharapkan.



**Data Klasifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
Berdasarkan KBLI 2020 (2023–2025)**

NAMA KLASIFIKASI BERDASARKAN KBLI 2020	2023	2024	2025
ARSITEKTUR	1.939	2.004	2.107
ARSITEKTUR LANSKAP DAN PERENCANAAN WILAYAH	263	275	269
BANGUNAN GEDUNG	45.535	47.128	49.064
BANGUNAN SIPIL	21.153	27.681	28.997
INSTALASI	2.076	2.339	2.323
KONSTRUKSI KHUSUS	482	496	466
KONSTRUKSI PRAPABRIKASI	83	72	70
KONSULTANSI ILMIAH DAN TEKNIS	99	110	116
PENGUJIAN DAN ANALISA TEKNIS	8	14	16
PENYELESAIAN BANGUNAN	506	881	1.052
PENYEWAAN PERALATAN	36	45	63
PERSIAPAN	1.272	1.074	1.02
REKAYASA	5.387	6.618	7.153
REKAYASA TERPADU	59	80	80
LAINNYA	10	2	0
Grand Total	78.908	88.819	92.796

Sumber: Data LPJK, Juli 2025

Dalam klasifikasi berdasarkan KBLI 2020 (Tabel 3):

- Klasifikasi "Bangunan Gedung" dan "Bangunan Sipil" tetap menjadi klasifikasi terbesar dan menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, mengindikasikan fokus pembangunan yang stabil di kedua klasifikasi ini.
- Klasifikasi "Rekayasa" juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 5.387 BUJK pada tahun 2023 menjadi 7.153 BUJK pada tahun 2025, sejalan dengan pertumbuhan BUJK kualifikasi Spesialis secara umum.
- Penurunan BUJK klasifikasi "Konstruksi Prapabrikasi" (dari 83 menjadi 70 BUJK) menjadi perhatian, mengingat teknologi prapabrikasi disebut sebagai tren penting dalam transformasi digital untuk efisiensi dan kualitas.

Tantangan dan Peluang Utama dalam Dinamika Jasa Konstruksi

A. Transformasi Digital dan Adopsi Teknologi

Sektor konstruksi perlu beradaptasi dengan teknologi digital seperti BIM, IoT, dan prefabrikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Adopsi ini memiliki tantangan, di antaranya biaya tinggi, kurangnya SDM terampil, dan resistensi terhadap perubahan.

B. Implementasi Konstruksi Berkelanjutan

Konstruksi berkelanjutan, bergeser dari sebuah kepatuhan menjadi keunggulan kompetitif, membuka peluang bisnis baru di sektor daur ulang material. Mengintegrasikan praktik konstruksi berkelanjutan, di antaranya pengelolaan limbah yang efektif, penggunaan material ramah lingkungan, dan desain hemat energi akan menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis inti adalah investasi jangka panjang yang krusial.

C. Peningkatan Daya Saing SDM

Rendahnya tingkat sertifikasi dapat menghambat adopsi teknologi dan kualitas industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi komprehensif dalam pengembangan SDM harus menjadi prioritas strategis utama.

Tingkat sertifikasi tenaga kerja yang rendah menjadi tantangan bagi sektor konstruksi. Tanpa tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat, penerapan teknologi modern atau praktik konstruksi berkelanjutan akan sulit diwujudkan.

Hal ini juga dapat menghambat kemampuan BUIK untuk beradaptasi dengan pergeseran pasar, di mana fokus pada layanan khusus semakin meningkat. Dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, BUIK dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, dan memenuhi standar kualitas internasional, sehingga memperkuat daya saing mereka di tengah tantangan fragmentasi pasar dan penurunan anggaran pemerintah.

D. Diversifikasi Pasar dan Penguatan Kemitraan

Diversifikasi Pasar perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah dengan secara aktif mencari peluang di sektor swasta (properti, industri, energi) dan berpartisipasi dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta yang didorong oleh pemerintah.

Penguatan Kemitraan didorong untuk dapat membangun kolaborasi strategis dengan sesama BUIK (terutama antara skala besar dan kecil/menengah), BUMN, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. Kemitraan ini dapat membantu berbagi risiko, sumber daya, dan keahlian yang diperlukan untuk proyek-proyek kompleks dan berteknologi tinggi.



Sumber: Lomba Foto Konstruksi Indonesia 2018

Rekomendasi Strategis Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Sektor konstruksi Indonesia berada di persimpangan jalan diantara dinamika anggaran pemerintah, pergeseran pasar, serta tuntutan teknologi dan keberlanjutan. Sektor konstruksi diproyeksikan menghadapi penurunan signifikan dalam anggaran pemerintah di tahun 2025 sehingga memaksa pergeseran model bisnis dari dominasi sektor publik menuju ekosistem yang lebih seimbang yang melibatkan investasi swasta dan *Public Private Partnership* (PPP).

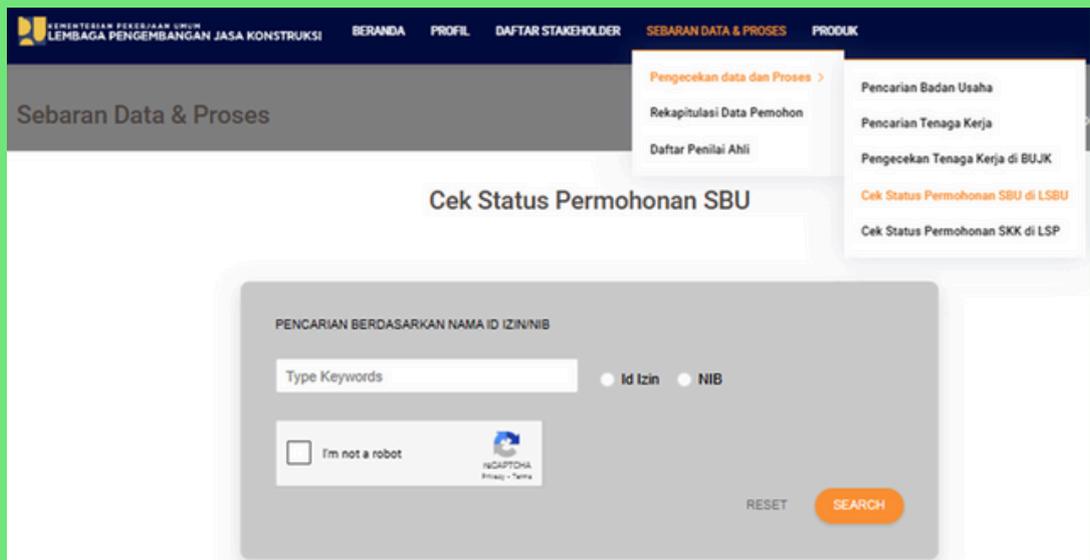
Disisi lain, percepatan adopsi teknologi digital (BIM, IoT, prefabrikasi) dan praktik konstruksi berkelanjutan menuntut pelaku usaha sektor tetap kompetitif dan memenuhi tuntutan pasar. Hal ini menyiratkan bahwa sektor konstruksi akan menjadi lebih kompleks dan kompetitif. Peningkatan persaingan akan datang, baik dari dalam negeri (dengan pergeseran komposisi BUJK) maupun dari luar negeri sehingga menuntut BUJK untuk mengembangkan kapabilitasnya.

- **BUJK Besar** harus memosisikan diri untuk memimpin proyek skala besar dan agresif berdiversifikasi ke sektor swasta (properti, industri, energi). BUJK besar diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan bermitra dengan BUJK Spesialis.
- **BUJK Menengah**, yang menghadapi tantangan penurunan jumlah entitas, perlu fokus pada efisiensi operasional, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan mencari peluang pasar spesialis atau subkontrak dari proyek-proyek besar (BUMN/swasta).
- **BUJK Kecil**, dengan pertumbuhan jumlah yang signifikan, memiliki peluang di proyek-proyek lokal. Fokus pada efisiensi, kualitas layanan, dan spesialisasi dalam area tertentu sangat penting. Peningkatan kapasitas SDM dan adopsi teknologi dasar yang relevan diperlukan untuk tetap kompetitif, dengan kemitraan dengan BUJK yang lebih besar sebagai subkontraktor dapat menjadi jalur pertumbuhan yang strategis.
- **BUJK Spesialis**, dengan pertumbuhan stabil, harus terus fokus pada penguasaan teknologi spesifik (misalnya, BIM, IoT, material inovatif), keahlian dalam konstruksi berkelanjutan, dan menawarkan nilai tambah yang tinggi. Ini adalah segmen yang paling siap menghadapi dinamika masa depan karena fokus pada keahlian tertentu.



Halo, Bagaimana jika terdapat kendala saat melakukan perubahan SBU pada OSS?

Permohonan perubahan SBU disampaikan melalui OSS pilih menu PBUMKU dan sub menu Perubahan, setelah menyampaikan data perubahan pastikan status di web LPJK melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-sbu> dengan keterangan perubahan tanpa asesmen



Dalam hal ada kendala di PBUMKU tidak dapat lanjut ke menu Portal Perizinan, sampaikan pengaduan ke OSS melalui wa +628116774642 atau email kontak@oss.go.id. Dalam hal kendala pada saat submit permohonan di Portal Perizinan, pastikan dahulu kesesuaian data dengan sumbernya, untuk data pengalaman, PJTBU, dan PJSKBU pengaduan ke LPJK, untuk data peralatan ke Pengelola SIMPK dan untuk data BUJK yang tidak sama dengan OSS pengaduan ke Portal Perizinan





Untuk Proses Perpanjangan SBU KBLI 2020 apa saja dokumen yang harus dipersiapkan?

SBU berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang melalui OSS pilih menu PBUMKU dan sub menu Perpanjangan, dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBU. Perpanjangan dengan menggunakan ID izin yang sama dengan SBU sebelumnya. Bila data ada perubahan, pada form permohonan pastikan klik dahulu tombol warna biru dengan tulisan perubahan dan jangan lupa disimpan. Permohonan yang sudah lolos verifikasi akan dikirimkan ke LSBU untuk proses sertifikasi yang dapat dipantau status pada web LPJK melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/cek-permohonan-sbu>

Bagaimana jika status SBU dibekukan dan dicabut saat proses tender?

SBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan kemampuan badan usaha, dikenakan sanksi peringatan, pembekuan atau pencabutan secara bertahap, hal ini sebagaimana diatur dalam PP 05/2021, Surat Menteri PUPR BK 10-Mn/75 dan SK Dirjen Binkon No 37/2025. Sesuai dengan ketentuan no 4 Surat Menteri PUPR BK 10-Mn/75 mengatur:

SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:

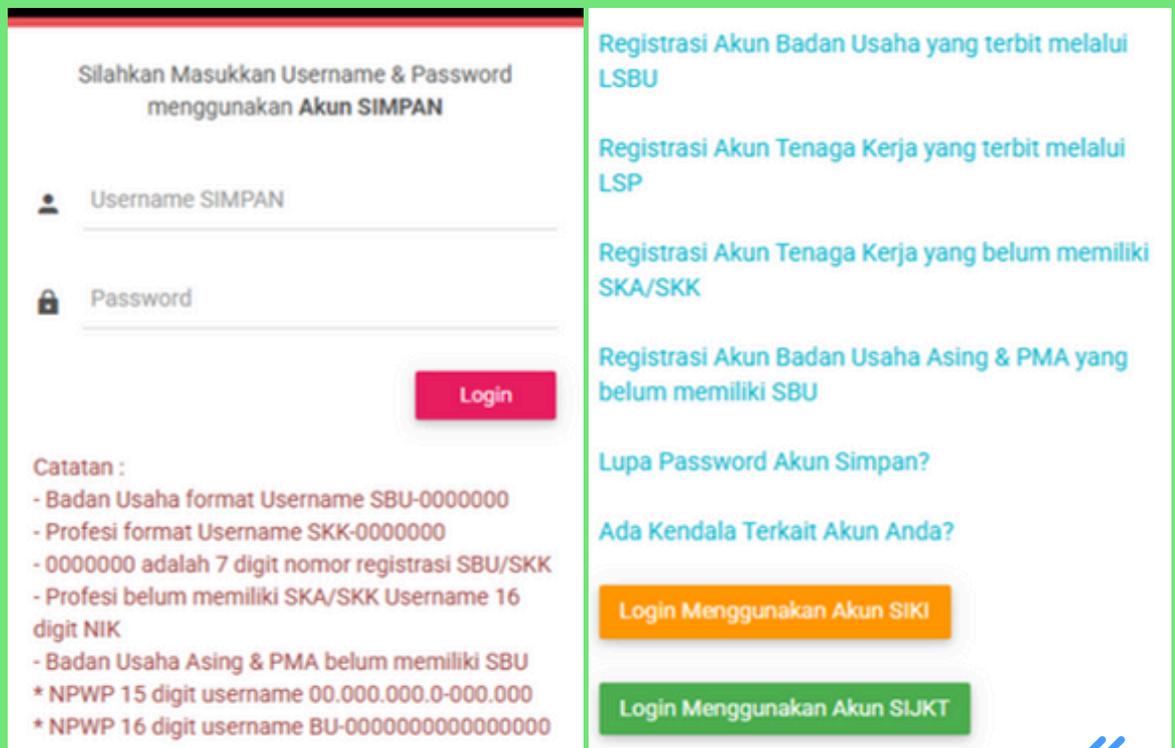
- tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
- tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
- tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak





Bagaimana cara mendapatkan akun simpan jika Tenaga Ahli lupa akun simpan?

Pastikan dahulu sudah memiliki akun SIMPAN dengan reset password pada e-SIMPAN. Dalam hal lupa password, dapat melakukan pembaharuan password dengan pilih menu "Lupa Paswod Akun SIMPAN" maka akan dikirimkan link ke email pemohon untuk mengganti password



Screenshot of the SIMPAN login page. The page title is "Silahkan Masukkan Username & Password menggunakan Akun SIMPAN". It features two input fields: "Username SIMPAN" and "Password", followed by a red "Login" button. Below the login fields, there is a "Catatan:" section with the following text:

- Badan Usaha format Username SBU-0000000
- Profesi format Username SKK-0000000
- 0000000 adalah 7 digit nomor registrasi SBU/SKK
- Profesi belum memiliki SKA/SKK Username 16 digit NIK
- Badan Usaha Asing & PMA belum memiliki SBU
- * NPWP 15 digit username 00.000.000.0-000.000
- * NPWP 16 digit username BU-000000000000000000

On the right side of the screenshot, there are several menu items:

- Registrasi Akun Badan Usaha yang terbit melalui LSBU
- Registrasi Akun Tenaga Kerja yang terbit melalui LSP
- Registrasi Akun Tenaga Kerja yang belum memiliki SKA/SKK
- Registrasi Akun Badan Usaha Asing & PMA yang belum memiliki SBU
- Lupa Password Akun Simpan?
- Ada Kendala Terkait Akun Anda?

At the bottom right of the screenshot, there are two buttons: "Login Menggunakan Akun SIKI" (orange) and "Login Menggunakan Akun SIJKT" (green).

Jika ada kendala seperti perubahan email dan lupa username akun maka lakukan claim akun SIMPAN dengan pilih menu "ada Kendala Terkait Akun Anda?" pada web SIMPAN atau melalui web LPJK pilih menu LAYANAN LPJK kemudian pilih menu "LAYANAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI" kemudian pilih menu "PERMOHONAN AKUN TKK". Pemohon menyampaikan bukti selfi secara langsung dan persetujuan claim akun berdasar hasil verifikasi LPJK. Perlu menjadi catatan bahwa menu ini bukan permohonan akun baru.





Bagaimana Cara Mengisi Pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK)?

Pencatatan AJK diperuntukan untuk permohonan pencatatan baru dan perubahan baik asosiasi terakreditasi maupun belum terakreditasi. Ajukan akun dahulu untuk mulai pencatatan melalui website <https://akreditasijakon.pu.go.id/pencatatan-ajk-v2>, akun akan dikirimkan ke email pemohon. Masukkan data asosiasi berupa data administrasi, sebaran anggota, pemilihan pengurus, sarana & prasaranan, kewajiban, dan data tambahan. Jika data telah lengkap, maka asosiasi dapat tercatat di LPJK. Daftar asosiasi tertayang pada laman <https://lpjk.pu.go.id/pencarian-asosiasi>.

Baik, terimakasih

Sama-sama



Layanan Konsultasi dan Pertanyaan

Apabila anda membutuhkan informasi tambahan yang berkaitan dengan **Pencatatan/ Registrasi, Akreditasi Asosiasi, Pelaksanaan Penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKKA), Penilai Ahli Kegagalan Bangunan, Rekomendasi Lisensi LSP dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan** silahkan menghubungi kami di:



158 (call center)



0815 1000 0158



www.lpjk.pu.go.id



@pu_lpjk



sekretariatlpjk@pu.go.id

atau dapat scan barcode berikut



Waktu Layanan:
Senin - Jumat
08.00 - 15.30 WIB

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

80



0852-1545-7775



buletinlpjk@gmail.com



www.buletinlpjk.id



@buletinlpjk